CIPS
Center for Indonesian Policy Studies

Makalah Kebijakan No. 55

Pentingnya Perdagangan bagi UMK di Sektor F&B Indonesia

oleh Hasran & Krisna Gupta

www.cips-indonesia.org

Makalah Kebijakan No. 55

Pentingnya Perdagangan bagi UMK di Sektor F&B Indonesia

Penulis:
Hasran & Krisna Gupta
Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Jakarta, Indonesia
Februari, 2023

Hak Cipta © 2023 oleh Center for Indonesian Policy Studies

Ucapan Terima Kasih:

ATLAS NETWORK

Makalah ini berhasil dibuat berkat dukungan dari Atlas Network, yang menghargai independensi analisis CIPS.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Haley Ham dan Keiran Ellis atas bantuannya dalam penelitian ini.

Sampul:
shutterstock.com/dusanfotopetkovic

DAFTAR ISI

Glosarium 7
Ringkasan Eksekutif 9
Selayang Pandang Sektor F&B di Indonesia 10
Ketenagakerjaan 11
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 13
Pekerja Informal 14
Strategi-Strategi Pemerintah untuk Sektor F&B 16
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015–2035 16
Making Indonesia 4.0 18
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian 2020–2024 19
Pentingnya Partisipasi ke Belakang (*Backward Participation*) dalam Rantai Nilai Global bagi Sektor F&B 21
Input Antara Industri 22
Input Antara untuk Sektor F&B 25
Menghubungkan Kinerja UMK dengan Impor Input Antara di Sektor F&B 27
Keefektifan Kebijakan-Kebijakan Saat Ini 30
Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan 35
Rekomendasi Kebijakan 36
Referensi 37
Lampiran 42
Data 44
Metode 46
Limitasi 53

Daftar Tabel

Tabel 1. Persentase Lapangan Kerja di Industri Non-Migas..... 11
Tabel 2. Target-target kuantitatif RIPIN 2015–2035..... 17
Tabel 3 Target-target kuantitatif Renstra Kemenperin 2020–2024..... 19
Tabel 4. Data agregat industri makanan dan minuman untuk perusahaan-perusahaan berskala mikro dan kecil, dalam miliar rupiah.... 43
Tabel 5. Koefisien ARDL untuk perusahaan-perusahaan berskala kecil dan mikro pada variabel-variabel terpilih..... 44
Tabel 6.1 Log *Output*, Usaha Kecil..... 47
Tabel 6.2 Log Ketenagakerjaan, Usaha Kecil..... 48
Tabel 6.3 Log Jumlah Perusahaan, Usaha Kecil..... 48
Tabel 6.4 Log Nilai Tambah, Usaha Kecil..... 48
Tabel 6.5 Log Nilai Tambah Per Perusahaan, Usaha Kecil..... 49
Tabel 6.6 Log Nilai Tambah Per Pekerja, Usaha Kecil..... 49
Tabel 6.7 Log Upah, Usaha Kecil..... 49
Tabel 6.8 Log *Output*, Usaha Mikro..... 50
Tabel 6.9 Log Ketenagakerjaan, Usaha Mikro..... 50
Tabel 6.10 Log Jumlah Perusahaan, Usaha Mikro..... 50
Tabel 6.11 Log Nilai Tambah, Usaha Mikro..... 51
Tabel 6.12 Log Nilai Tambah Per Perusahaan, Usaha Mikro..... 51
Tabel 6.13 Log Nilai Tambah Per Pekerja, Usaha Mikro..... 51
Tabel 6.14 Log Upah, Usaha Mikro..... 52
Tabel 6.15 Hasil Uji *Bound* F..... 52

Daftar Gambar

Gambar 1. Upah Bulanan di UMK dan Industri Non-Migas (2019)..... 13
Gambar 2. Hubungan Rantai Nilai Global..... 21

GLOSARIUM

ADB:
Asian Development Bank (Bank Pembangunan Asia)

ARDL:
Autoregressive Distributed Lag

BPS:
Badan Pusat Statistik

F&B:
Food and Beverages (Makanan dan Minuman)

FLFP:
Female Labor Force Participation (Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan)

IBS:
Industri Besar dan Sedang

Kemenko Perekonomian:
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kemendag:
Kementerian Perdagangan

Kemen KP:
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kemenperin:
Kementerian Perindustrian

Kementan:
Kementerian Pertanian

NTM:
Non-Tariff Measures (Hambatan Non-Tarif)

PDB:
Produk Domestik Bruto

Renstra:
Rencana Strategis

RIPIN:
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional

SI:
Survei Industri

Susenas:
Survei Sosial Ekonomi Nasional

UMK:
Usaha Mikro dan Kecil

WBES:
World Bank Enterprise Survey (Survei Perusahaan Bank Dunia)

WTO:
World Trade Organization (Organisasi Perdagangan Dunia)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2019, industri makanan dan minuman (*food and beverage* atau F&B) memberi sumbangan terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia dan mengalami pertumbuhan secara rerata 7,78%, tertinggi dibandingkan industri non-minyak dan gas (non-migas) lainnya. Industri ini juga menjadi satu-satunya industri non-migas yang mencatat surplus perdagangan. Di tahun tersebut, impor oleh industri ini menurun secara rerata 0,1% per tahun, sementara ekspornya meningkat secara rerata 0,7% per tahun.

Sektor F&B menyerap jumlah tenaga kerja terbanyak di antara sektor non-migas lainnya pada tahun 2019. Meski jumlah pekerja perempuan di perusahaan F&B berskala besar dan menengah hanya mencapai sepertiga (36%) dari total jumlah pekerja, mereka membentuk lebih dari separuh pekerja (56% di industri makanan dan 58% di industri minuman) di Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Barang setengah jadi sangatlah penting bagi industri F&B, dan impor barang-barang ini akan meningkatkan produktivitas maupun ekspor. Kendati demikian, impor barang setengah jadi masih belum menjadi kebijakan yang populer bagi kementerian-kementerian teknis yang mengatur sektor F&B. Kementerian Pertanian (Kementan) ingin mengurangi impor dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan petani. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana untuk mengurangi kebergantungan pada impor barang setengah jadi untuk sektor F&B dengan memperkuat industri hulu.

Makalah ini menunjukkan bagaimana impor barang setengah jadi (input antara) dapat menguntungkan UMK di sektor F&B, khususnya dalam hal *output* dan ketenagakerjaan. Kami memperkirakan bahwa pada perusahaan-perusahaan F&B berskala mikro dan kecil, peningkatan impor input antara akan meningkatkan *output*, nilai tambah, upah, serta margin intensif. Temuan ini juga memperlihatkan mengapa kebijakan pengurangan impor yang ditujukan pemerintah untuk mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia justru salah arah dan berpotensi merugikan industri ini.

Makalah ini mengusulkan enam rekomendasi kebijakan: Pertama, Kemenperin perlu meninjau ulang kebijakan substitusi impornya pada sektor F&B dan memberikan alasan mengapa target pengurangan impor dapat dikaitkan dengan target pertumbuhan industri F&B. Kedua, pemerintah perlu meninjau dampak perdagangan terhadap perusahaan manufaktur di sektor F&B. Ketiga, pemerintah perlu memisahkan data industri minyak kelapa sawit dari data industri F&B secara umum. Keempat, pemerintah perlu memperbaiki kualitas datanya serta memastikan bahwa data-data tersebut tersedia dan dapat diakses secara publik. Kelima, pemerintah perlu melakukan evaluasi yang bersifat waktu-nyata (*real-time*) atas kebijakan Neraca Komoditas dan kebijakan hilirisasinya . Yang terakhir, Kemenperin perlu mengevaluasi kebijakan proteksionisnya dengan menggunakan perangkat lain selain kebijakan perdagangan.

SELAYANG PANDANG SEKTOR F&B DI INDONESIA

Aktivitas di dalam sektor makanan dan minuman (*food and beverage* atau F&B) meliputi produksi pertanian, manufaktur F&B, dan jasa F&B, serta mencakup semua kegiatan pengolahan dalam rantai nilai pangan yang menghubungkan produk pertanian dengan konsumen akhir. Termasuk di dalam Industri F&B adalah industri penggilingan, produksi barang setengah jadi (barang antara) seperti garam dan gula, serta pengolahan untuk makanan kemasan, yang semuanya merupakan bagian krusial dalam sistem makanan yang kompleks. Jasa F&B mencakup distribusi makanan melalui grosir, ritel, serta pelayanan hospitalitas F&B. Makalah ini akan berfokus pada manufaktur dan jasa F&B.

> Pada tahun 2019, industri F&B merupakan industri non-migas dengan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto (GDP) dan mengalami pertumbuhan secara rerata 7,78% per tahunnya.

Pada tahun 2019, industri F&B merupakan industri non-migas dengan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto (GDP) dan mengalami pertumbuhan secara rerata 7,78% per tahunnya (Kemenperin, 2020). Di kuartal kedua tahun 2021, industri F&B menyumbang 6,70% terhadap PDB Indonesia, atau senilai USD 18,57 miliar. Pada 2021, total ekspor F&B juga mencapai USD 16,94 miliar—tumbuh 16% dari ekspor tahun sebelumnya dan mewakili 7,25% dari total ekspor Indonesia (Kemenperin, 2021; BPS, 2021b).

Industri F&B bergantung pada pasokan barang setengah jadi yang berasal dari produksi domestik maupun impor. Barang-barang setengah jadi tersebut dapat berupa namun tidak terbatas pada gula, kedelai, gandum, minyak sayur, dan tepung terigu. Di tahun 2019, impor di industri F&B mengalami penurunan secara rerata 0,1% per tahun, sementara ekspornya meningkat secara rerata 0,7% per tahun (Kemendag, 2022).

Berbagai dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian, termasuk berkurangnya permintaan, terganggunya rantai pasok, berkurangnya kapasitas produksi, dan berkurangnya tenaga perkerja, secara signifikan mempengaruhi industri F&B. Terlepas dari tantangan-tantangan tersebut, sektor manufaktur F&B mengalami pertumbuhan selama masa pandemi, bersama dengan industri logam, kimia, dan farmasi (BPS, 2021a).

Sementara itu, sektor jasa F&B berkontribusi sebesar USD 51,7 miliar terhadap PDB Indonesia pada 2019, atau setara dengan 4,3% dari total PDB Indonesia di tahun tersebut (Oxford Economics, 2021). Jasa F&B mencakup semua kegiatan terkait penyajian makanan di restoran dan katering. Tidak seperti industri F&B secara umum, jasa F&B mengalami kontraksi selama pandemi COVID-19, dan kontribusinya terhadap PDB merosot akibat penerapan kebijakan restriksi. Selama kuartal kedua, ketiga, dan keempat tahun 2020, kontribusi jasa F&B terhadap PDB mengalami penurunan sebesar -21,97%, -11,81%, dan -8,88%, secara berturut-turut, dari tahun sebelumnya. Ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dihentikan pada kuartal kedua tahun 2021, kontribusi jasa F&B terhadap PDB kembali naik dengan peningkatan sebesar 25,10% dibandingkan kuartal kedua tahun 2020 (BPS, 2021c).

Sektor F&B di Indonesia didominasi oleh minyak kelapa sawit dan produk-produk turunannya. Minyak kelapa sawit digunakan untuk membuat minyak goreng, margarin, mentega putih, minyak samin sayur/*vanaspati*, lemak konfeksioneri, isian/krim, *fat spread*, susu minyak nabati (*filled milk*), Alternatif Lemak Kakao (*Cocoa Butter Alternatives*) (CBE/CBS/CBR), dan pengemulsi

lainnya. Data yang digunakan oleh pemerintah dalam melaporkan pertumbuhan industri F&B tidak memisahkan minyak kelapa sawit dari kegiatan non-minyak kelapa sawit lainnya. Dengan kata lain, data pertumbuhan industri F&B lebih mencerminkan pasar komoditas minyak kelapa sawit dibandingkan sektor manufaktur F&B secara keseluruhan.

Ketenagakerjaan

Sektor F&B Indonesia menyediakan peluang kewirausahaan dan lapangan kerja yang besar. Lapangan kerja di industri non-migas Indonesia sebagian besar diisi oleh tenaga kerja dari sektor F&B. Di perusahaan besar dan sedang, sektor ini mempekerjakan sekitar 17,8% dari total jumlah tenaga kerja, sedangkan di Usaha Mikro dan Kecil (UMK), jumlahnya mencapai 36% dari total pekerja industri non-migas UMK pada 2019. Di sektor jasa, F&B menyediakan 3,6 juta lapangan pekerjaan baru di Indonesia antara 2015 hingga 2019. Angka ini meliputi 600.000 pekerjaan baru di sektor grosir dan ritel dan 3 juta di sektor hospitalitas (Oxford Economics, 2021).

Tabel 1.
Persentase Lapangan Kerja di Industri Non-Migas

Nama Industri	Perusahaan Berskala Menengah dan Besar		UMK	
	2018	2019	2018	2019
Makanan dan Minuman	18%	17,8%	40,7%	36,0%
Pengolahan Tembakau	5%	4,8%	9,4%	14,1%
Tekstil	10%	9,3%	4,3%	4,9%
Pakaian Jadi	12%	12,8%	11,5%	11,5%
Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	6%	7,7%	2,1%	1,5%
Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur), dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	4%	4,1%	10,9%	11,6%
Kertas dan Barang dari Kertas	2%	2,4%	0,2%	0,2%
Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	1%	1,3%	1,2%	0,9%
Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi	1%	0,3%	0,0%	0,0%
Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	4%	3,7%	0,6%	0,7%
Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional	2%	1,4%	0,2%	0,3%
Karet, Barang dari Karet dan Plastik	7%	7,3%	0,5%	0,3%
Barang Galian Bukan Logam	3%	3,4%	7,3%	6,8%
Logam Dasar	2%	2,1%	0,2%	0,1%
Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	3%	2,7%	3,6%	3,0%
Komputer, Barang Elektronik dan Optik	2%	2,3%	0,0%	0,0%

Mesin dan Perlengkapan yang Tidak Termasuk dalam Lainnya	2%	1,4%	0,1%	0,1%
Kendaraan Bermotor, Trailer, dan Semi-Trailer	4%	4,0%	0,1%	0,1%
Alat Angkutan Lainnya	2%	2,1%	0,2%	0,2%
Furnitur	3%	2,9%	4,2%	3,9%
Pengolahan Lainnya	3%	3,1%	2,6%	3,7%
Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0%	0,5%	0,2%	0,2%

Sumber: BPS

> Upah di sektor F&B jauh lebih rendah dibandingkan upah di industri non-migas lainnya.

Upah di sektor F&B lebih rendah dibandingkan upah di industri non-migas lainnya. Di perusahaan-perusahaan F&B berskala menengah dan besar, rata-rata pekerja mendapatkan upah sekitar IDR 4 juta per bulan pada 2019. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan upah bulanan di industri bahan kimia, elektronik, dan otomotif, dan hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan industri tekstil (Grup Bank Dunia & Bappenas, 2020). Para pekerja UMK sektor F&B juga dibayar lebih sedikit dibandingkan pekerja industri lainnya, dan hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan upah pekerja industri tembakau, farmasi, dan barang galian bukan logam. Besaran upah ini bervariasi tergantung jumlah hari kerja. Pekerja di perusahaan-perusahaan kecil yang bekerja setidaknya 10 hari dalam sebulan dapat menerima upah sekitar IDR 400.000, sementara yang bekerja setidaknya 20 hari dalam sebulan dapat menerima upah sebesar IDR 1.162.000. Mereka yang bekerja 30 hari dalam sebulan memperoleh penghasilan sekitar IDR 1.912.000. Di bidang jasa F&B, rata-rata pekerja menerima upah bulanan sebesar IDR 2,1 juta, sedikit lebih tinggi dibandingkan upah di sektor pertanian (BPS, 2022).

> Para pekerja UMK sektor F&B juga dibayar lebih sedikit dibandingkan pekerja industri lainnya, dan hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan upah pekerja industri tembakau, farmasi, dan barang galian bukan logam.

Gambar 1.
Upah Bulanan di UMK dan Industri Non-Migas (2019)

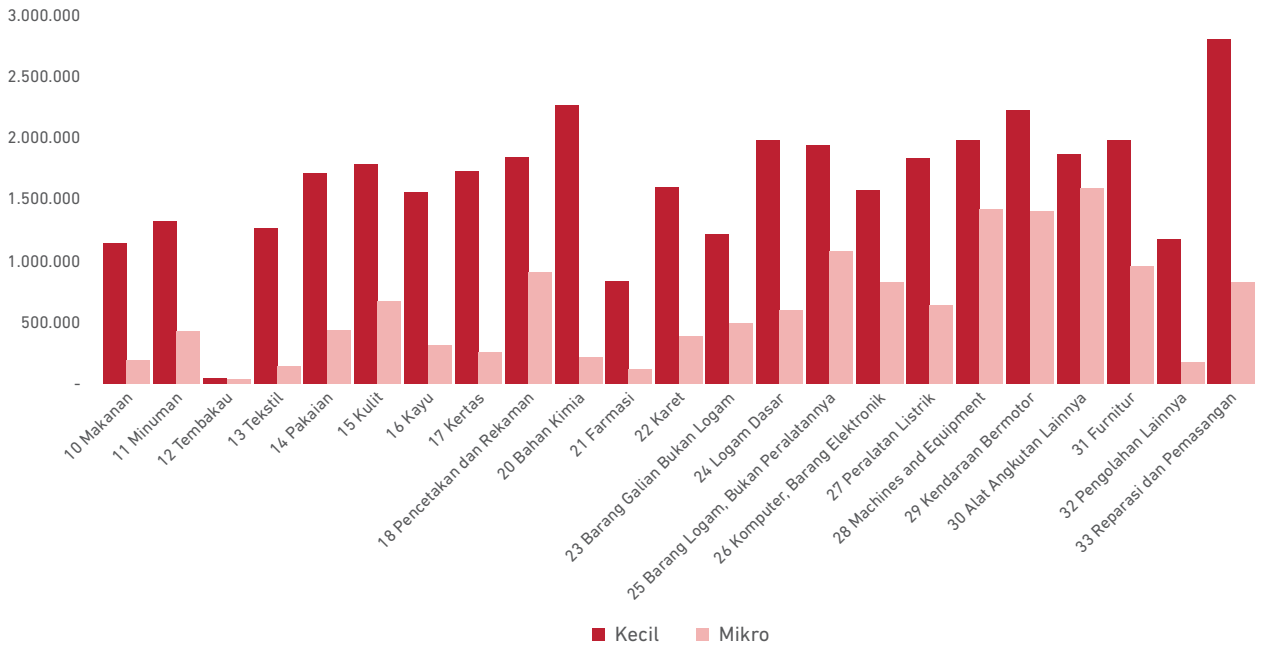

Sumber: BPS

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Pada tahun 2020, pekerja perempuan hanya mendominasi sekitar 37,85% dari jumlah pekerja di perusahaan-perusahaan jasa F&B berskala menengah dan besar. Angka ini berlaku untuk pekerja formal, sementara pada sektor informal perbedaan antara proporsi tenaga kerja perempuan dan laki-laki jauh lebih menonjol.

Di perusahaan berskala besar dan sedang, perempuan membentuk sebesar 36% dari total tenaga kerja di industri makanan dan 32% di industri minuman. Sementara itu, jumlah pekerja perempuan mencapai lebih dari separuh pekerja di UMK—56% di industri makanan dan 58% di industri minuman. Para pekerja perempuan di UMK F&B dibayar lebih rendah dibandingkan laki-laki karena memiliki jumlah jam kerja yang lebih sedikit dan dibayar dengan upah per jam yang lebih rendah dibandingkan pekerja laki-laki. Bahkan, banyak dari mereka tidak dibayar karena mereka adalah pemilik atau saudara dekat dari pemilik usahanya.

> Para pekerja perempuan di UMK F&B dibayar lebih rendah dibandingkan laki-laki karena memiliki jumlah jam kerja yang lebih sedikit dan dibayar dengan upah per jam lebih rendah dibandingkan pekerja laki-laki.

Terlepas dari berbagai perubahan yang signifikan dalam perekonomian Indonesia sepuluh tahun terakhir, partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja masih dapat dibilang relatif stagnan. Terdapat sejumlah hambatan yang menyebabkan rendahnya angka partisipasi angkatan kerja perempuan, termasuk tingkat pendidikan, status pernikahan, struktur rumah tangga, usia, dan akses ke perkotaan (Monash, 2017; Cameron et al., 2019). Namun, partisipasi angkatan kerja perempuan diprediksi meningkat pada generasi yang lebih muda (Monash, 2017). Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi

perempuan di daerah perkotaan telah meningkat, sementara partisipasi perempuan berusia lebih muda di daerah perdesaan berkurang karena mereka meninggalkan pekerjaan informal tak berbayar (Cameron *et al*., 2019).

Kesenjangan upah antargender juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam partisipasi angkatan kerja perempuan, dimana persentase kesenjangan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan adalah sebesar 34% di sektor formal dan 50% di sektor informal, mencerminkan adanya praktik-praktik diskriminatif (Monash, 2017). Menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Monash (2017) memperlihatkan bahwa peluang perempuan menjadi pekerja informal di daerah perkotaan tiga kali lebih besar dibandingkan laki-laki. Penyebabnya adalah ketika laki-laki lebih banyak mengisi lapangan pekerjaan di daerah perkotaan, perempuan cenderung menjadi pekerja tak dibayar saat memiliki anak yang perlu diurus. Selain itu, di semua industri di Indonesia, jam kerja bagi laki-laki rata-rata secara konsisten lebih tinggi dibandingkan perempuan. Persentase laki-laki dan perempuan yang bekerja dengan jam kerja berlebih (lebih dari 48 jam per minggu), tercatat sebesar 31,8% dan 24,5%, secara berturut-turut.

> "kebijakan-kebijakan yang menguntungkan perusahaan F&B berskala mikro dan kecil, khususnya yang memungkinkan mereka meningkatkan produktivitas dan upah atau memformalkan usaha mereka, dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia."

Secara umum, kebijakan-kebijakan yang menguntungkan perusahaan F&B berskala mikro dan kecil, khususnya yang memungkinkan mereka meningkatkan produktivitas dan upah atau memformalkan usaha mereka, dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia.

Pekerja Informal

Ekonomi informal merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pekerja atau unit ekonomi yang tidak atau kurang dicakup oleh aturan formal (UNICEF, 2021). Kegiatan-kegiatan tersebut dapat berbentuk kepemilikan tunggal dan/atau usaha milik keluarga yang tidak terdaftar di kantor pencatatan usaha, pemerintah kota, provinsi, atau otoritas pajak (Asian Development Bank, 2022). Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kegiatan ekonomi informal sebagai kegiatan yang tidak terdaftar, berskala kecil, atau berstatus usaha milik pribadi dengan sedikit atau tidak ada karyawan yang dibayar secara tetap, beroperasi di 'tempat-tempat tak terlihat' seperti rumah tangga, atau tidak memiliki tempat yang tetap (BPS, 2022b).

Rothenberg *et al.* (2016) menemukan bahwa perusahaan-perusahaan informal di Indonesia cenderung membayar upah yang kecil dan memiliki produktivitas yang lebih rendah dibandingkan perusahaan-perusahaan formal, baik di perusahaan besar dan sedang maupun UMK. Ditambah lagi, perempuan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menjadi pekerja informal (ASEAN, 2022). Pada tahun 2021, sekitar 63,80% dari keseluruhan 51,79 juta pekerja perempuan Indonesia bekerja secara informal, sementara dari 79,26 juta pekerja laki-laki, hanya 56,61% yang bekerja secara informal (BPS, 2022c).

Ekonomi informal berkontribusi besar terhadap ketenagakerjaan di sektor F&B Indonesia walaupun produktivitasnya tergolong rendah. Di tahun 2020, 79% UMK sektor makanan dan 62% sektor minuman adalah unit usaha informal, sedangkan 76% pekerja di UMK sektor makanan

dan 68% pekerja sektor minuman merupakan pekerja informal. Di antara pekerja informal UMK sektor F&B tersebut, mayoritas dari mereka adalah tenaga kerja perempuan. Sektor informal menyediakan peluang pekerjaan yang fleksibel bagi perempuan, terutama bagi mereka yang ingin bekerja dekat dari rumah (Alatas & Newhouse, 2010).

Pandemi COVID-19 serta dampaknya terhadap industri, jasa makanan, dan transportasi telah meningkatkan jumlah tenaga kerja informal (Kahkonen, 2021). Jasa F&B mengalami penurunan drastis dari segi pendapatan. Banyak restoran harus tutup sementara atau memotong jam kerja karyawannya. Walaupun sektor manufaktur F&B mengalami pertumbuhan di kala pandemi, 13% dari total UMK di sektor F&B harus menutup sementara operasinya. Pengurangan jam kerja memaksa banyak pekerja yang sebelumnya bekerja di sektor formal untuk beralih ke sektor informal ketika pandemi. Perempuan menjadi pihak yang paling rentan keluar dari sektor formal. Perempuan memang merupakan pemilik sebagian besar UMK di industri F&B, tetapi jumlah usaha milik perempuan yang terpaksa tutup (7%) mencapai dua kali lipat dibandingkan usaha milik laki-laki (3,4%) (UNICEF, UNDP, Prospera, & SMERU, 2021).

Melihat pentingnya sektor F&B bagi perekonomian Indonesia khususnya karyawan berketerampilan rendah (*low-skilled*), pemerintah telah mengembangkan sejumlah strategi yang dirancang untuk mendukung sektor ini, termasuk di dalamnya adalah kebijakan-kebijakan perdagangan internasional yang melindunginya dari persaingan asing. Terlepas dari fakta tersebut, barang antara merupakan komponen yang penting bagi industri F&B, dimana impornya dapat menunjang ekspor dan produktivitas sektor F&B.

STRATEGI-STRATEGI PEMERINTAH UNTUK SEKTOR F&B

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) adalah kementerian teknis yang bertanggung jawab atas sektor F&B di Indonesia dan telah memiliki berbagai strategi jangka pendek maupun panjang yang ditujukan untuk mengurangi impor barang antara melalui dukungannya terhadap pengembangan industri hulu domestik.[1]

Strategi-strategi pemerintah untuk sektor F&B diuraikan dalam tiga dokumen Kemenperin: Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015–2035; peta jalan (*roadmap*) bernama *Making Indonesia 4.0*; dan Rencana Strategis (Resntra) Kemenperin 2020–2024. RIPIN ditujukan untuk mengurangi kebergantungan terhadap impor bahan baku, menambah lapangan kerja di industri-industri yang ada, serta menetapkan sektor F&B sebagai salah satu dari 10 industri prioritas. Di tahun 2019, *Making Indonesia 4.0* menetapkan sektor F&B sebagai sektor prioritas utama dan memprediksi bahwa sektor F&B Indonesia akan menjadi *powerhouse* F&B di ASEAN pada 2030. Sementara itu, Renstra memuat ambisi Kemenprin untuk mengurangi impor terhadap bahan baku industri dan menambah lapangan kerja di sektor F&B.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015–2035[2]

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015–2035 memuat tentang peran pemerintah dalam pengembangan industri nasional dan menekankan keseriusan pemerintah dalam mencapai target industri nasional (Kemenperin, 2016). Pelaksanaan RIPIN dibagi dalam tiga tahap, yaitu 2015–2019, 2020–2024, dan 2025–2035.

> RIPIN memuat strategi kementrin dalam meningkatkan PDB, ekspor, dan jumlah tenaga kerja di sektor industri sembari mengurangi kebergantungan pada impor barang-barang industri.

RIPIN memuat strategi Kemenperin dalam meningkatkan PDB, ekspor, dan jumlah tenaga kerja di sektor industri sembari mengurangi kebergantungan pada impor barang-barang industri. RIPIN menyediakan pedoman untuk pengambilan keputusan sektoral di tiap industri. Selain itu, RIPIN juga digunakan oleh para gubernur, bupati, dan wali kota dalam merencanakan pembangunan industri di daerah mereka masing-masing.

Alasan di balik keinginan Kemenperin untuk meningkatkan ekspor bersih adalah adanya kepercayaan bahwa ekonomi akan lebih baik jika produk yang diekspor tersebut dihasilkan melalui penggunaan bahan baku domestik daripada menggunakan bahan baku impor. Guna meningkatkan penggunaan bahan baku domestik, Kemenperin menerapkan strategi yang menghambat masuknya pemasok

[1] Industri hulu berfokus pada ekstraksi bahan baku yang digunakan untuk keperluan manufaktur. Di sektor F&B, industri hulu terlibat dalam pengolahan tahap awal komoditas-komoditas pertanian, seperti penggilingan tepung, pemerasan minyak, dan bubuk kakao yang selanjutnya digunakan untuk membuat produk-produk yang dapat dikonsumsi.
[2] RIPIN menjalankan mandat Pasal 9 Undang-Undang No. 3/2014 tentang Perindustrian.

internasional ke dalam pasar domestik. Strategi ini juga menghalangi masuknya produsen hilir baru karena mereka akan terbebani oleh harga bahan baku yang tinggi

akibat tidak adanya persaingan asing. Tujuannya adalah untuk mendorong produsen domestik agar beralih dari impor dan menggunakan produk antara domestik atau juga dikenal dengan kebijakan substitusi impor. Dalam pendekatan proteksionis ini, Kemenperin menargetkan pengurangan rasio impor bahan baku industri terhadap GDP industri pengolahan non-migas dari 43,1% pada 2015 menjadi 20% pada 2035.

RIPIN juga menetapkan target terkait kualitas maupun jumlah tenaga kerja di sektor industri. Kemenperin berencana menambah angka tenaga kerja di sektor industri dari 15,5 juta orang pada 2015 menjadi 29,2 juta orang pada 2035 melalui pemberdayaan industri hulu domestik serta dengan menggenjot produksinya. Target investasi pada sektor industri untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan ini meningkat dari IDR 270 triliun pada 2015 menjadi IDR 4.150 triliun pada 2035. Kemenperin juga memiliki rencana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui edukasi dan pelatihan, terutama yang berhubungan dengan penguasaan teknologi pangan.

Tabel 2.
Target-target kuantitatif RIPIN 2015–2035

No	Target	Unit	2015	2020	2025	2035
1	Kontribusi industri non-migas terhadap PDB nasional	Persentase	21,2	24,9	27,4	30,0
2	Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor nasional	Persentase	67,3	69,8	73,5	78,4
3	Jumlah pekerja di sektor industri	Juta Orang	15,5	18,5	21,7	29,2
4	Rasio pekerja di sektor industri terhadap jumlah total pekerja nasional	Persentase	14,1	15,7	17,6	22,0
5	Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri non-migas	Persentase	43,1	26,9	23,0	20,0

Kemenperin telah menetapkan 10 kelompok industri prioritas yang diklasifikasikan sebagai industri andalan, pendukung, dan hulu. Industri pangan menjadi salah satu industri andalan[3]. Industri pendukung meliputi industri barang modal; bahan baku; bahan penolong; dan jasa industri. Terakhir, yang termasuk dalam industri hulu adalah industri hulu agro; logam dasar dan bahan galian bukan logam; serta gas, minyak, dan kimia dasar berbasis migas dan batu bara (Kemenperin, 2016).

[3] Industri andalan lainnya meliputi industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan; industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka; industri transportasi; industri elektronika dan telematika; dan industri pembangkit energi.

Making Indonesia 4.0

Kemenperin memperkenalkan *Making Indonesia 4.0* pada tahun 2018 sebagai peta jalan dengan tujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai salah satu dari 10 kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada 2030. Peta jalan ini didasarkan pada revolusi industri keempat, yang ditandai oleh adanya terobosan-terobosan baru dalam dunia teknologi. Demi mencapai tujuan ini, Indonesia akan berusaha meningkatkan ekspor bersihnya dengan membangun kembali sektor manufaktur. Pelaksanaan *Making Indonesia 4.0* ditargetkan akan mendorong pertumbuhan PDB sebesar 6–7% per tahun, menciptakan 30 juta lapangan kerja, serta menambah kontribusi sektor manufaktur hingga 25% dari PDB pada 2030 (Kemenperin, 2018).

> *Making Indonesia 4.0* dibuat berdasarkan RIPIN 2015-2035. Ketika RIPIN mengklasifikasikan 10 industri prioritas, *Making Indonesia 4.0* mengkerucutkan fokusnya pada tujuh industri prioritas, salah satunya adalahsektor F&B.

Making Indonesia 4.0 dibuat berdasarkan RIPIN 2015-2035. Ketika RIPIN mengklasifikasikan 10 industri prioritas, *Making Indonesia 4.0* mengkerucutkan fokusnya pada tujuh industri prioritas, salah satunya adalahsektor F&B[4]. Industri-industri tersebut dipilih karena kontribusinya yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan ekspor Indonesia di masa mendatang.

Making Indonesia 4.0 dirancang untuk membuat Indonesia menjadi powerhouse F&B di ASEAN dan pemain terbesar kelima dalam sektor F&B dunia pada 2030. Upaya yang dilakukan meliputi pembangunan sektor hulu dan perbaikan sektor manufaktur lewat enam cara: Peningkatan produktivitas sektor hulu agro melalui pemanfaatan teknologi; Pemberdayaan UMK melalui pembiayaan dan dukungan teknologi; Perbaikan efisiensi rantai pasok; Peningkatan produksi makanan kemasan modern melalui inovasi produk; Pertumbuhan skala industri dengan memanfaatkan besarnya permintaan domestik; dan peningkatan ekspor untuk menjadi powerhouse produksi F&B yang unggul secara regional.

Making Indonesia 4.0 akan diimplementasikan dalam tiga tahap. Tahap pertama (2018–2022) dititikberatkan pada pengurangan impor produk pertanian dan bahan baku untuk sektor manufaktur. Dalam periode ini, produk-produk yang menjadi produk ekspor utama Indonesia adalah minyak kelapa sawit, beras, ayam, gula, kakao, pati, aneka olahan ikan, dan buah-buahan dan sayuran olahan. Tahap kedua (2021–2025) difokuskan untuk memperluas ekspor sektor F&B ke negara-negara ASEAN untuk produk kemasan sederhana dan medium. Dalam periode ini, Kemenperin akan memprioritaskan komoditas-komoditas seperti minuman botol, mi instan, teh siap minum (ready-to-drink atau RTD), dan kopi. Tahap ketiga (2026–2030) akan menyasar persaingan pasar global dengan produk-produk modern dan kompleks seperti makanan bayi dan suplemen makanan.

Dominasi UMK di sektor F&B Indonesia akan membuat tujuan menjadi *powerhouse* F&B ASEAN sulit dicapai. UMK dan para pekerjanya rentan terhadap persaingan global, salah satunya karena tingkat adaptasi teknologinya yang masih rendah. Selain itu, tantangan lain yang juga dihadapi oleh UMK adalah rendahnya produktivitas karena adanya gangguan dalam rantai pasok bahan baku.

[4] Industri prioritas lainnya dalam *Making Indonesia 4.0* adalah industri tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, dan kimia.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian 2020–2024

Renstra 2020–2024 merupakan implementasi tahap 2 dari RIPIN dengan mempertimbangkan pokok-pokok gagasan yang berkembang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dan *Making Indonesia 4.0* (Kemenperin, 2020). RIPIN menetapkan strategi umum untuk Kemenperin dan mengidentifikasi 10 industri prioritas. *Making Indonesia 4.0* mempersempit cakupannya menjadi tujuh industri prioritas dan memasang target-target yang ingin dicapai oleh setiap industri dalam jangka panjang. Renstra menetapkan target-target kuantitatif untuk setiap industri selama periode 2020 hingga 2024, termasuk industri F&B.

> Renstra menetapkan target-target kuantitatif untuk setiap industri selama periode 2020 hingga 2024, termasuk industri F&B.

Renstra 2020–2024 tidak memisahkan target-target industri makanan dari hasil laut dan perikanan, serta menggabungkan target industri minuman dengan hasil tembakau dan bahan penyegar. Karenanya, sulit untuk mengukur target spesifik Kemenperin untuk sektor F&B melalui Renstra 2020-2024.

Tabel 3.
Target-target kuantitatif Renstra Kemenperin 2020–2024

Strategi	Unit	2020	2023	2024
Pertumbuhan PDB sektor manufaktur non-migas.	Persentase	5,3	7,8	8,4
• Industri makanan, hasil laut, dan perikanan	Persentase	7,22	9,44	9,95
• Industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar	Persentase	3,29	5,40	5,77
Jumlah tenaga kerja di sektor manufaktur non-migas.	Juta Orang	19,2	21,5	22,5
• Industri makanan, hasil laut, dan perikanan	Juta Orang	4,89	5,58	5,89
• Industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar	Juta Orang	0,83	0,92	0,96
Rasio tenaga kerja di sektor manufaktur non-migas terhadap total tenaga kerja nasional.	Persentase	15	15,5	15,7
• Industri makanan, hasil laut, dan perikanan	Persentase	3,80	4,03	4,11
• Industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar	Persentase	0,65	0,67	0,67
Nilai ekspor produk-produk manufaktur non-migas	USD Miliar	133,1	164,9	181,6
• Industri makanan, hasil laut, dan perikanan	USD Miliar	32,93	42,53	46,52
• Industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar	USD Miliar	3,56	4,50	4,89
Rasio impor bahan baku industri terhadap PDB sektor non-migas	Persentase	37,80	37,00	36,80
• Industri makanan, hasil laut, dan perikanan	Persentase	3,15	3,21	3,20
• Industri minuman, produk tembakau, dan bahan penyegar	Persentase	0,43	0,42	0,41

Renstra menargetkan peningkatan pertumbuhan PDB di industri makanan, hasil laut, dan perikanan dari 7,22% pada 2020 menjadi 9,95% pada 2024, yang juga disokong oleh peningkatan nilai ekspor dari USD 32,93 miliar menjadi USD 46,52 miliar. Pada 2024, Renstra menargetkan penambahan jumlah tenaga kerja di sektor-sektor ini sebanyak 1 juta orang karena meningkatnya ekspor manufaktur dan PDB dari industri-industri tersebut. Target-target yang ditetapkan untuk industri minuman juga serupa dengan target-target industri makanan, dan PDB juga diharapkan akan meningkat seiring dengan kenaikan nilai ekspor dan jumlah lapangan kerja.

Meski Renstra adalah bentuk implementasi tahap kedua dari RIPIN, target-target kuantitatifnya berbeda. Contohnya, ketika RIPIN disusun, target rasio impor bahan baku terhadap industri non-migas adalah 26,9% pada 2020. Akan tetapi, angka ini disesuaikan dalam Renstra menjadi 37,80%. Perbedaan ini juga dapat dilihat dalam hal penurunan impor bahan baku, dimana RIPIN menargetkan sebesar 23% pada 2025, sementara Renstra menyesuaikannya menjadi 36,80%.

Baik RIPIN, *Making Indonesia 4.0*, maupun Renstra 2020–2024 mengabaikan pentingnya impor dan partisipasi yang kuat dalam rantai nilai global untuk pengembangan sektor F&B Indonesia.

“Baik RIPIN, *Making Indonesia 4.0*, maupun Renstra 2020–2024 mengabaikan pentingnya impor dan partisipasi yang kuat dalam rantai nilai global untuk pengembangan sektor F&B Indonesia.”

PENTINGNYA PARTISIPASI KE BELAKANG (*BACKWARD PARTICIPATION*) DALAM RANTAI NILAI GLOBAL BAGI SEKTOR F&B

> Keikutsertaan dalam GVC dapat digolongkan kedalamsebagai partisipasi ke depan (forward participation) atau partisipasi ke belakang (backward participation) (Bank Dunia, 2020).

Menurut OECD, sekitar 70% dari perdagangan global dilakukan dalam bentuk partisipasi rantai nilai global (*global value chain* atau GVC) (OECD, 2020). Daripada membangun rantai pasok domestiknya sendiri, perusahaan lebih cenderung bergabung dalam jejaring produksi global dimana komponen suatu produk diproduksi di negara yang berbeda.

Keikutsertaan dalam GVC dapat digolongkan ke dalam partisipasi ke depan (*forward participation*) atau partisipasi ke belakang (backward participation) (Bank Dunia, 2020). Partisipasi ke belakang dalam GVC (juga dikenal sebagai kandungan nilai tambah luar negeri dalam produk ekspor) adalah kandungan produk antara impor yang digunakan dalam produksi barang setengah jadi ataupun barang jadi domestik untuk tujuan diekspor (WTO). Negara-negara yang memiliki keterbatasan sumber daya alam atau lahan untuk memproduksi hasil pertanian dapat menghasilkan produk-produk olahan makanan melalui partisipasi ke belakang, yaitu dengan memperoleh bahan baku dari negara lain, atau dikenal dengan istilah "mengimpor untuk mengekspor".

Suatu negara dapat dikatakan ikut serta dalam GVC melalui partisipasi ke depan apabila sebagian besar produk antara domestiknya digunakan oleh negara lain untuk memproduksi barang jadi dengan tujuan untuk ekspor kembali. Negara-negara yang terlibat dalam partisipasi ke depan dalam rantai nilai global kemungkinan besar merupakan eksportir sumber daya alam untuk digunakan sebagai input oleh negara-negara pengimpor (Amanta & Gupta, 2022).

Gambar 2.
Hubungan Rantai Nilai Global

Sumber: World Bank

Di Indonesia, meski partisipasi ke depan maupun ke belakang dalam rantai nilai global sama-sama mengalami penurunan, partisipasi ke depan secara konsisten lebih tinggi daripada partisipasi ke belakang. Dengan kata lain, dibandingkan mengekspor barang jadi, Indonesia cenderung mengekspor barang antara yang dijadikan sebagai input produksi oleh negara pengimpor. Antara tahun 2000 hingga 2017, partisipasi ke depan dalam rantai nilai global berkurang dari 21,5% menjadi 12,9% dari total nilai tambah produk akhir, sedangkan partisipasi ke belakang turun dari 16,9% menjadi 10,1% (ADB, 2019).

Lemahnya partisipasi ke belakang Indonesia dalam GVC tidak lepas dari strategi pemerintah yang mendukung industri hulu seperti pertanian dan sumber daya alam melalui kebijakan proteksionis, yaitu substitusi impor[5]. Strategi ini membatasi impor barang antara, terutama di sektor manufaktur berteknologi rendah seperti F&B, tembakau, karet, tekstil, dan kulit. Partisipasi ke belakang yang semakin lemah berarti barang antara yang dibutuhkan untuk memproduksi barang akhir lebih banyak diperoleh secara domestik. Ini juga berarti bahwa nilai tambah luar negeri yang digunakan dalam produksi domestik menjadi berkurang. Antara tahun 2000 hingga 2017, nilai tambah domestik berkontribusi hingga lebih dari 90% terhadap ekspor bruto Indonesia. Di sisi lain, nilai tambah luar negeri berkontribusi sebesar 13,2% dari ekspor bruto sektor industri nasional pada tahun 2017 (ADB, 2019).

> Lemahnya partisipasi ke belakang Indonesia dalam GVC tidak lepas dari strategi pemerintah yang mendukung industri hulu seperti pertanian dan sumber daya alam melalui kebijakan proteksionis, yaitu substitusi impor.

Input Antara Industri

Partisipasi GVC dapat memfasilitasi akses perusahaan terhadap jejaring, pasokan, pengetahuan, dan teknologi. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan manufaktur menjadi semakin menggeliat sehingga mendukung pembangunan ekonomi. Dalam hal ini, GVC dapat dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pekerjaan yang lebih layak yang pada akhirnya dapat mengurangi angka kemiskinan (Bank Dunia, 2020).

[5] Sebaliknya, barang jadi atau tahap produksi selanjutnya adalah bagian "hilir" dari bahan baku atau barang setengah jadi.

Ketenagakerjaan

Partisipasi ke belakang dalam rantai nilai global memungkinkan perusahaan-perusahaan dalam suatu negara untuk mengimpor barang antara dari luar negeri. Ketika tarif input impor lebih rendah, barang setengah jadi yang diimpor bisa jadi lebih murah dibandingkan yang diproduksi di dalam negeri (Kis-Katos & Sparrow, 2015). Kis-Katos dan Sparrow (2015) juga menunjukkan bagaimana liberalisasi perdagangan dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Pengurangan tarif impor barang antara akan mengurangi biaya barang antara dan memungkinkan perusahaan memproduksi hasil yang lebih berkualitas. Hal ini akan membuat perusahaan menjadi lebih kompetitif sehingga mampu menarik tenaga kerja baru sekaligus mempertahankan pekerja yang sudah ada. Kis-Katos dan Sparrow (2015) juga menemukan bahwa liberalisasi perdagangan memiliki pengaruh yang kuat terhadap peningkatan partisipasi angkatan kerja. Dampak ini lebih terlihat jelas pada pekerja lulusan sekolah dasar dan umumnya pengaruhnya akan lebih besar pada pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah[6]

> Pengurangan tarif impor barang antara akan mengurangi biaya barang antara dan memungkinkan perusahaan memproduksi hasil yang lebih berkualitas. Hal ini akan membuat perusahaan menjadi lebih kompetitif sehingga mampu menarik tenaga kerja baru sekaligus mempertahankan pekerja yang sudah ada.

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi ke belakang dalam GVC akan meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan ketika manfaat terhadap akses barang impor dirasakan oleh sektor-sektor yang banyak mempekerjakan perempuan, seperti sektor F&B.

Pengaruh pengurangan tarif terhadap partisipasi angkatan kerja perempuan berbeda di setiap sektor tergantung sebesar apa proporsi pekerja perempuan di dalam sektor tersebut. Perusahaan juga dapat mengimpor barang modal, dimana barang tersebut dapat memudahkan pekerjaan fisik sehingga menciptakan kesempatan yang setara (*level playing field*) bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk melakukan suatu pekerjaan.

Kis-Katos et al. (2018) mengidentifikasi dampak liberalisasi perdagangan terhadap pasar tenaga kerja dan pekerjaan rumah tangga di Indonesia. Mereka menyimpulkan bahwa pengurangan tarif impor barang antara dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan jam kerja bagi pekerja perempuan. Pengurangan tarif impor ini juga dapat menambah proporsi perempuan yang bekerja lebih dari 30 jam per minggu, serta mengurangi jumlah pekerja perempuan yang pekerjaan utamanya adalah mengurus rumah tangga. Penyebabnya adalah impor barang antara memberikan pilihan lebih banyak bagi perempuan untuk beralih melakukan pekerjaan yang ditawarkan oleh pasar, daripada bekerja paruh waktu dan melakukan pekerjaan rumah tangga sebagai kegiatan utamanya.

> Pengurangan tarif impor barang antara dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan jam kerja bagi pekerja perempuan.

[6] Kis-Katos dan Sparrow (2015) menemukan bahwa penurunan satu standar deviasi dalam tarif input mengurangi penurunan partisipasi kerja sekitar 77% dari standar deviasinya. Untuk mereka yang tidak menempuh pendidikan sama sekali, dampak penurunannya adalah 72%, sedangkan untuk mereka yang telah menempuh pendidikan dasar, dampak penurunannya adalah 156% dari standar deviasinya. Untuk kategori pendidikan menengah (sekolah menengah pertama), ukuran dan signifikansi statistiknya berkurang. Sementara itu, untuk kategori pendidikan tertinggi, hasilnya tidak signifikan secara statistik.

Upah

Partisipasi ke belakang dalam GVC dapat meningkatkan upah selama penurunan tarif impor produk-produk antara tersebut juga mengurangi biaya produksi. Berkurangnya biaya produksi yang diiringi dengan peningkatan kualitas produk sebagai dampak dari adanya persaingan asing (baik karena barang impor memiliki kualitas yang lebih baik atau karena barang domestik meningkatkan kualitasnya demi bisa bersaing) membuat perusahaan menjadi lebih produktif dan menguntungkan. Dengan meningkatnya produktivitas maupun profitabilitas, sangat mungkin bagi perusahaan untuk menaikkan upah karyawannya. Perusahaan yang lebih produktif juga semakin kompetitif di pasar global, sehingga lebih mungkin memproduksi untuk untuk tujuan ekspor. Amity dan Davis (2009) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki produktivitas tinggi akan lebih cenderung mengekspor dan membayar upah yang lebih tinggi. Mereka juga menemukan bahwa besaran upah sangat bervariasi tergantung jenis perusahaannya: perusahaan eksportir membayar upah 28% lebih tinggi, perusahaan importir membayar upah 47% lebih tinggi, dan perusahaan yang mengekspor dan mengimpor membayar upah 66% lebih tinggi.

"Berkurangnya biaya produksi yang diiringi dengan peningkatan kualitas produk sebagai dampak dari adanya persaingan asing (baik karena barang impor memiliki kualitas yang lebih baik atau karena barang domestik meningkatkan kualitasnya demi bisa bersaing) membuat perusahaan menjadi lebih produktif dan menguntungkan. Dengan meningkatnya produktivitas maupun profitabilitas, sangat mungkin bagi perusahaan untuk menaikkan upah karyawannya."

Wage skill premium adalah perbedaan upah relatif antar pekerja produksi dan pekerja non-produksi. *Wage skill premium* yang lebih besar menunjukkan adanya ketimpangan yang tinggi. Amiti dan Cameron (2012) meneliti dampak liberalisasi perdagangan terhadap *wage skill premium* di Indonesia. Mereka menemukan bahwa penurunan tarif impor barang antara dapat mengurangi wage skill premium pada perusahaan yang mengimpor barang antara tersebut. Penurunan tarif input sebesar 10% dapat mengurangi wage skill premium sebesar 4,5% pada perusahaan importir. Pengaruh ini lebih kuat pada importir dengan persentase impor yang lebih besar. Untuk importir yang berada di persentil ke-90, pengurangan tarif input sebesar 10% dapat menurunkan *wage skill premium* hingga 8,4%.

Alasan di balik dampak negatif impor barang setengah jadi terhadap *wage premium* adalah sebagai berikut: Produksi barang setengah jadi (barang antara) di Indonesia umumnya lebih banyak membutuhkan tenaga kerja terampil dibandingkan ketika memproduksi barang jadi yang lebih banyak membutuhkan tenaga kurang terampil (Amiti & Cameron, 2012). Karena mempekerjakan tenaga kerja terampil dinilai mahal, akan lebih menguntungkan bagi perusahaan untuk menempuh jalur impor. Di saat yang sama, dengan mengimpor barang setengah jadi, perusahaan dapat lebih memprioritaskan produksi barang jadi, yang hanya membutuhkan tenaga kerja berketerampilan rendah. Ini dapat meningkatkan permintaan atas tenaga kerja berketerampilan rendah yang pada akhirnya menaikkan upah mereka.

Input Antara untuk Sektor F&B

Sebagian besar input antara dalam manufaktur F&B adalah produk-produk pertanian seperti biji padi-padian, garam, gula, dan protein hewani yang membutuhkan kondisi iklim dan geografis tertentu untuk dapat diproduksi secara kompetitif (Scoppola, 2021). Menyiasati kondisi iklim dan geografis yang kurang mendukung akan lebih sulit dilakukan dan memakan biaya yang lebih besar. Maka dari itu, untuk menghasilkan produk-produk F&B berkualitas tinggi dan bernilai tambah, Indonesia perlu mengimpor input antara dari negara lain.

Amanta dan Gupta (2022) menemukan bahwa ekspor produk-produk F&B Indonesia didominasi oleh minyak kelapa sawit dan produk-produk turunannya, alih-alih barang jadi hilir seperti mi instan atau biskuit. Produksi minyak kelapa sawit dan produk-produk turunannya ini hanya sedikit atau bahkan tidak membutuhkan impor sama sekali. Dengan demikian, menggabungkan minyak kelapa sawit dan produk turunannya dengan produk lain di industri ini menyamarkan pentingnya impor input antara dalam produksi barang jadi di sektor F&B. Tanpa adanya pemisahan minyak kelapa sawit dari produksi F&B, pemerintah dapat membuat asumsi yang salah bahwa impor barang antara tidaklah penting bagi produksi F&B Indonesia.

> "Menggabungkan minyak kelapa sawit dan produk turunannya dengan produk lain di industri ini menyamarkan pentingnya impor input antara dalam produksi barang jadi di sektor F&B."

Minyak kelapa sawit sendiri merupakan input antara, yang menjelaskan kenapa produsennya diuntungkan oleh kebijakan proteksionis. Misalnya, minyak kelapa sawit dapat digunakan dalam produksi mi instan untuk menggoreng adonan, sehingga kehadiran tarif impor input antara dapat mendorong perusahaan mi Indonesia untuk terus menggunakan minyak kelapa sawit lokal. Meskipun minyak kelapa sawit Indonesia adalah bahan terbaik untuk menggoreng adonan mi, produksi mi instan Indonesia masih tetap membutuhkan bahan-bahan lain seperti gandum, garam, bawang putih, dan bubuk cabai, yang semuanya merupakan produk-produk impor dan akan terdampak oleh kebijakan pengurangan impor.

Apabila minyak kelapa sawit tidak dimasukkan dalam analisis, dapat terlihat jelas bahwa partisipasi ke belakang dalam GVC sangatlah penting bagi manufaktur F&B Indonesia. Menggunakan data impor dan ekspor barang antara dan barang jadi di sektor F&B, Amanta dan Gupta (2022) menemukan bahwa peningkatan sebesar 1% dalam impor input antara dapat meningkatkan pertumbuhan ekspor sebesar 0,96%. Kenaikan ini cukup signifikan di tengah tingginya konsumsi domestik Indonesia (sebagian besar hasil peningkatan produksi akan dikonsumsi secara domestik). Temuan ini juga selaras dengan temuan penelitian lain seperti Pane dan Patunru (2022) yang menyatakan bahwa impor input antara dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekspor perusahaan manufaktur Indonesia. Selain itu, akses terhadap input antara yang lebih berkualitas dapat membantu perusahaan menjual produknya di pasar internasional yang lebih menguntungkan dan menerapkan standar keamanan pangan yang lebih baik, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa (UE).

Temuan-temuan dari Amanta dan Gupta (2022) juga menunjukkan bahwa pengurangan impor barang antara akan merugikan industri F&B. Maka dari itu, tujuan Kemenperin dipandang kurang tepat karena pengurangan impor akan menghambat pertumbuhan dan ketenagakerjaan industri F&B. Kemenperin percaya bahwa substitusi impor dapat membantu F&B karena datanya

masih menggabungkan minyak kelapa sawit dengan produk-produk lain dalam industri F&B. Jika Indonesia merasa cukup dengan bergantung pada minyak kelapa sawit dan produk-produk turunannya atau produk pertanian hulu lainnya, substitusi impor tidak akan terlalu merugikan. Akan tetapi, produk-produk pertanian memiliki harga yang lebih volatil dibandingkan barang-barang jadi seperti mi dan biskuit.

Mengubah strategi untuk menyokong industri pertanian dan industri berbasis sumber daya alam juga tidak sesuai dengan target Indonesia untuk mengembangkan industri manufakturnya. Strategi ini juga bertentangan dengan upaya Indonesia untuk mendiversifikasi ekspornya yang lebih dari sekadar ekspor produk komoditas.

MENGHUBUNGKAN KINERJA UMK DENGAN IMPOR INPUT ANTARA DI SEKTOR F&B[7]

Data Indonesia, terutama Survei Industri (SI), menggabungkan minyak kelapa sawit serta turunannya dengan produk lain dalam industri F&B, sehingga menyamarkan pentingnya impor input antara bagi manufaktur F&B dan industri hilir lainnya. Oleh sebab itu, kami berfokus pada perusahaan-perusahaan berskala mikro dan kecil di industri F&B. Minyak kelapa sawit dan minyak goreng adalah barang-barang yang membutuhkan modal dalam jumlah besar, yang produksinya diuntungkan oleh ekonomi skala (*economies of scale*). Maka dari itu, produksi minyak kelapa sawit dan minyak goreng lebih banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar (Muhid, 2022). Berdasarkan asumsi tersebut, dengan menggunakan data perusahaan berskala mikro dan kecil secara tidak langsung juga dapat mengeluarkan komponen kelapa sawit dan produk turunannya dalam analisis ini. Dengan berfokus pada perusahaan-perusahaan yang lebih kecil, kita dapat melihat dampak langsung impor input antara terhadap UMK, yang mempekerjakan mayoritas pekerja dan wirausahawan di industri F&B. Perusahaan kecil juga cenderung mempekerjakan lebih banyak pekerja perempuan dan informal, sebagaimana telah dibahas di bab sebelumnya.

Melitz (2003) menunjukkan bahwa dampak perdagangan terhadap perusahaan-perusahaan di industri yang sama bisa berbeda-beda tergantung dari efisiensi dan ukuran tiap perusahaan. Dengan adanya liberalisasi perdagangan, perusahaan yang lebih efisien akan menjadi lebih produktif dan lebih mungkin melakukan ekspor, sedangkan perusahaan yang kurang efisien akan terpaksa keluar dari pasar. Selain itu, dampak perubahan kebijakan perdagangan pada perusahaan kecil akan lebih besar dibandingkan perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Kami mengestimasi dampak impor input antara terhadap industri F&B berdasarkan ukuran perusahaan (silakan merujuk pada Lampiran untuk informasi terperinci terkait metodologi yang digunakan).

Untuk perusahaan kecil di industri F&B, peningkatan sebesar 1% dalam impor input antara di tahun berjalan akan meningkatkan output sebesar 2,73% di tahun selanjutnya. Di perusahaan mikro, peningkatan sebesar 1% dalam impor input antara akan meningkatkan *output* sebesar 4,53% di tahun selanjutnya. Peningkatan pada nilai tambah industri F&B lebih besar dibandingkan peningkatan output, yaitu sebesar 3,25% untuk perusahaan kecil dan 4,92% untuk perusahaan mikro. Intuisi di balik peningkatan ini adalah input impor antara menyediakan akses terhadap bahan yang lebih murah dan/atau berkualitas, sehingga ada lebih banyak perusahaan yang dapat memasuki pasar dan menjadi lebih produktif.

[7] Pembahasan yang lebih teknis mengenai bagian ini tersedia di Lampiran.

Analisis data berdasarkan jumlah perusahaan dan pekerja menunjukkan bahwa peningkatan sebesar 1% dalam impor input antara meningkatkan rerata nilai tambah per perusahaan sebesar 4,52% untuk perusahaan kecil dan 4,01% untuk perusahaan mikro di tahun selanjutnya. Untuk nilai tambah per pekerja, peningkatannya adalah sebesar 4,5% untuk perusahaan kecil dan 4,09% untuk perusahaan mikro[8]. Hasil ini memperlihatkan bahwa impor input antara dapat membuat perusahaan menjadi lebih produktif.

> 1% dalam impor input antara meningkatkan rerata upah sebesar 4,4% untuk industri kecil dan 5,07% untuk industri mikro di tahun selanjutnya.

Ketika menilik hubungan antara impor input antara dengan rerata upah di perusahaan mikro dan kecil, kami menemukan bahwa peningkatan sebesar 1% dalam impor input antara meningkatkan rerata upah sebesar 4,4% untuk industri kecil dan 5,07% untuk industri mikro di tahun selanjutnya.[9]

Hasil penelitian kami juga menunjukkan bahwa perubahan dalam impor produk antara tidak berpengaruh pada jumlah perusahaan dan pekerja pada perusahaan mikro dan kecil di sektor F&B. Dalam hal jumlah pekerja, pergerakan buruh pada UMK terbilang cukup dinamis, dan mudah bagi mereka untuk beralih dari sektor formal ke sektor informal. Inilah yang menjadi alasan mengapa perubahan dalam impor barang antara kurang berpengaruh pada jumlah pekerja. Dalam hal jumlah perusahaan, peningkatan impor tidak menciptakan lebih banyak perusahaan, tetapi membuat usaha-usaha yang ada dan tenaga kerjanya lebih efisien dan produktif, sehingga upah mereka juga meningkat.

Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa akses terhadap input antara yang diimpor dapat mengurangi biaya produksi, membuat perusahaan menjadi lebih produktif, serta mendorong peningkatan profitabilitas dan upah para pekerjanya. Perusahaan yang lebih produktif juga akan lebih kompetitif di pasar global, sehingga lebih mungkin untuk menjadi eksportir.

Pengaruh impor input antara terhadap UMK lebih besar dibandingkan pada perusahaan besar dan sedang menunjukkan bahwa kemampuan UMK dalam beradaptasi dengan perubahan kebijakan perdagangan sangat terbatas. Perusahaan kecil umumnya tidak mengimpor barang mereka sendiri secara langsung dan hanya menjadi pengikut harga (*price taker*) di pasar domestik. Dengan kata lain, kecil kemungkinan bagi UMK untuk mengimpor secara langsung dari pasar internasional dengan harga yang lebih rendah. Mereka justru lebih memanfaatkan impor yang tersedia di pasar dengan harga yang ditawarkan oleh para importir utama (Gupta, 2021; Pane & Patunru, 2021). Agar ekonomi Indonesia tidak bergantung pada harga komoditas yang volatil dan untuk meningkatkan nilai tambah domestik pada industri F&B, impor input antara sebaiknya tidak dikurangi.

[8] Perlu dicatat bahwa angka per pekerja dan per perusahaan jauh lebih tinggi untuk industri perusahaan kecil dibandingkan nilai tambah industri. Jumlah perusahaan pada industri perusahaan kecil lebih volatil dibandingkan jumlah perusahaan mikro (lihat Lampiran). Terdapat kemungkinan bahwa keluar dan masuknya perusahaan-perusahaan kecil lebih volatil (antara naik menjadi perusahaan berskala menengah atau turun menjadi perusahaan berskala mikro).

[9] Perlu dicatat bahwa jumlah tenaga kerja dan biayanya digabungkan dari perusahaan-perusahaan mikro dan kecil. Angka-angka ini mungkin tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya karena banyak perusahaan mikro dan kecil tidak memiliki pekerja.

Analisis kami menemukan bahwa tidak ada dampak signifikan dari impor input antara terhadap perusahaan besar di sektor F&B Indonesia. Temuan ini sekaligus mendukung asumsi kami bahwa perusahaan-perusahaan tersebut kemungkinan besar didominasi oleh perusahaan minyak kelapa sawit dan produk-produk turunannya, yakni produk yang membutuhkan sedikit barang antara dan tidak terlalu dipengaruhi oleh perubahan kebijakan impor. Hasil analisis ini juga semakin menunjukkan pentingnya memisahkan minyak kelapa sawit dan produk-produk turunannya dari sektor F&B secara umum ketika mengumpulkan dan menggunakan data untuk menjelaskan industri F&B Indonesia.

Temuan-temuan ini memiliki implikasi bagi strategi pemerintah Indonesia untuk mengembangkan sektor F&B dalam hal kontribusi PDB, ekspor, ketenagakerjaan, dan upah, yang akan dibahas di bagian selanjutnya.

"Tidak ada dampak signifikan dari impor input antara terhadap perusahaan besar di sektor F&B Indonesia. Temuan ini sekaligus mendukung asumsi kami bahwa perusahaan-perusahaan tersebut kemungkinan besar didominasi oleh perusahaan minyak kelapa sawit dan produk-produk turunannya."

KEEFEKTIFAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN SAAT INI

Pemerintah Indonesia berencana meningkatkan pertumbuhan output, ekspor, dan ketenagakerjaan sektor F&B di Indonesia menggunakan dua jenis kebijakan. Yang pertama adalah kebijakan-kebijakan yang memengaruhi proses impor, seperti hambatan non-tarif (*non-tariff measures*) dan Neraca Komoditas. Yang kedua adalah kebijakan memperkuat industri hulu dengan mengurangi impor barang antara untuk sektor manufaktur seperti yang telah dibahas sebelumnya.

Impor produk antara dalam industri F&B bisa melibatkan lebih dari satu kementerian teknis. Misalnya, impor garam melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kemen KP) dan Kemenperin, sementara impor gula, bawang putih, daging sapi, dan rempah-rempah lainnya untuk penggunaan industri melibatkan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kemenperin.

Kuota impor setiap tahunnya ditentukan dalam pertemuan tahunan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Kementerian-kementerian teknis tidak selalu sepakat satu sama lain karena mereka mewakili kepentingan yang berbeda-beda, serta kerap menggunakan data yang berbeda juga. Misalnya, Kemen KP berupaya membatasi impor garam demi kepentingan para petani garam domestik, sedangkan Kemenperin ingin menambah kuota impor garam untuk memenuhi permintaan industri. Setelah ditentukan, kuota tahunan selanjutnya disampaikan ke Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Sistem kuota dan pengurangan impor akan menyebabkan harga produk pangan dalam negeri cenderung lebih tinggi dibandingkan harga yang ada di pasar global (Fane & Wart, 2008). Sistem kuota juga dapat menjadi ajang perburuan rente dan praktik korupsi. Contohnya dalam kasus impor garam, korupsi terjadi karena sejumlah pejabat dari Kemenperin menetapkan kuota impor lebih tinggi dari yang sesungguhnya dibutuhkan oleh industri (Dirgantara, 2022). Selain itu, ada juga beberapa kasus korupsi impor bawang putih yang menggunakan modus penarikan pungutan (Aryan, 2022), korupsi impor daging sapi (Patunru & Rahardja, 2015), suap impor gula (Persada, 2020), korupsi ekspor benih lobster (Nindita, 2021), dan korupsi ekspor minyak kelapa sawit mentah (*crude palm oil*) (Ni'am, 2022), yang semuanya melibatkan prosedur kuota impor maupun ekspor.

Sistem Neraca Komoditas yang baru diperkenalkan Indonesia dipercaya dapat mengurangi korupsi dan mempercepat proses perizinan impor. Perusahaan pengimpor dapat secara langsung memasukkan rencana kebutuhan impor tahunannya melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK), yaitu sebuah subsistem dari sistem *Indonesia National Single Window* (INSW). Dengan demikian, sistem ini dapat meningkatkan transparansi sekaligus memangkas satu tahapan dalam proses aplikasi izin impor, yaitu surat rekomendasi untuk importir dari kementerian teknis (Gupta, Pane, & Pasaribu, 2022).

Neraca Komoditas telah meregulasi 24 komoditas, yang enam di antaranya merupakan bahan baku untuk sektor F&B: beras, garam, gula, daging sapi, produk-produk perikanan, dan jagung. Akan tetapi, sejumlah hal dalam implementasinya masih diwarnai ketidakjelasan. Pertama, sistem Neraca Komoditas sangat bergantung pada data permintaan dan penawaran. Impor tidak akan dilakukan jika pasokan domestik melebihi permintaan. Pendekatan ini sekaligus mengesampingkan dimensi harga dan kualitas yang acap kali disebut oleh perusahaan sebagai alasan utama importasi suatu komoditas. Kedua, data yang digunakan untuk menghitung kuota impor sering tidak akurat, sehingga masih menjadi polemik antar kementerian[10]. Ketiga, kuota impor yang disetujui oleh pemerintah bisa jadi lebih sedikit dari yang diajukan oleh importir, dan tidak ada penjelasan mengenai bagaimana kuota ini dihitung dan dialokasikan kepada perusahaan.

Neraca Komoditas telah meregulasi 24 komoditas, yang enam di antaranya merupakan bahan baku untuk sektor F&B: beras, garam, gula, daging sapi, produk-produk perikanan, dan jagung. Akan tetapi, sejumlah hal dalam implementasinya masih diwarnai ketidakjelasan.

Baik RIPIN Kemenperin 2015–2035, *Making Indonesia 4.0*, maupun Renstra 2020–2024 bertujuan untuk mengurangi kebergantungan terhadap impor barang antara. Upaya ini dilakukan untuk mengembangkan industri hulu berbasis sumber daya alam dengan mengadopsi teknologi termutakhir di sektor pertanian, meningkatkan keunggulan Indonesia di pasar domestik dan asing, serta meningkatkan ekspor produk-produk industri.

Seperti yang telah kita lihat, pengurangan impor demi melindungi industri hulu adalah kebijakan yang merugikan sektor F&B Indonesia. Sebanyak 54,8 juta pekerja di sektor pertanian Indonesia, yang menjadi sasaran utama untuk diuntungkan oleh kebijakan pengurangan impor input industri, hidup di bawah atau sedikit di atas garis kemiskinan. Akan tetapi, impor tidak hanya melindungi sektor pertanian dari produk asing, tetapi juga dapat membuat harga pangan di Indonesia menjadi lebih mahal. Kenaikan harga pangan dapat merugikan masyarakat kurang mampu Indonesia, termasuk para petani. Dalam kasus pembatasan impor beras, sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk petani di daerah perdesaan dan petani berpendapatan rendah, merupakan *net consumer* beras. Artinya, pengeluaran mereka untuk membeli beras lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh dari penjualan hasil panennya (Patunru & Ilman 2019). Secara umum, kebijakan pembatasan impor tidak hanya menghambat pertumbuhan sektor F&B, tetapi juga berisiko merugikan masyarakat yang semula ingin dibantu oleh kebijakan ini.

Secara umum, kebijakan pembatasan impor tidak hanya menghambat pertumbuhan sektor F&B, tetapi juga berisiko merugikan masyarakat yang semula ingin dibantu oleh kebijakan ini.

[10] Dalam kasus impor jagung pada tahun 2015, terdapat perbedaan data dimana Kementan menunjukkan adanya surplus jagung sebanyak 3 juta ton, sedangkan Kemenko Perekonomian menyatakan jagung mengalami defisit sebanyak 1,5 juta ton (Fauzi, 2016). Lagi-lagi, di tahun 2018, Kementan melaporkan surplus beras, sedangkan Kemendag mengatakan sebaliknya (Patunru & Ilman, 2019). Masih belum jelas bagaimana Neraca Komoditas dapat memperbaiki keakuratan mekanisme pengumpulan data komoditas-komoditas tersebut.

Argumen lain dari pengurangan impor adalah kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi ketidakpastian pasar global. Namun, kebergantungan pada pasar domestik juga tidak menjamin adanya kestabilan. Misalnya saja, di bulan Januari 2014, banjir di Pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, Nusa Tenggara, dan Kalimantan merendam 400.000 hektar sawah dengan estimasi kerugian mencapai IDR 1,2 triliun. Selain itu, kekeringan berkepanjangan pada 2015 dan awal 2016 memaksa para petani untuk menunda masa tanam padi hingga tiga bulan. Dua kasus tersebut menunjukkan bahwa produksi domestic dapat terganggu karena faktor iklim dan untuk menstabilkannya dapat dilakukan dengan adanya kemudahan akses terhadap impor.

Terdapat sejumlah kebijakan yang lebih baik untuk membantu petani daripada menggunakan kebijakan perdagangan. Glorya dan Nugraha (2019) mengusulkan beberapa intervensi untuk memperbaiki kesejahteraan petani, termasuk melalui pelatihan tentang cara mengakses jasa keuangan, program-program manajemen kualitas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian, dan pertanian kontrak untuk memastikan kestabilan harga dan memperbaiki hubungan antara petani dengan pemain lain dalam rantai pasok.

Patunru dan Respatiadi (2017) juga mengusulkan sejumlah program untuk membantu memperbaiki kesejahteraan petani. Beberapa di antaranya adalah program bantuan tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan atau PKH), dan bantuan biaya kesehatan (Kartu Indonesia Sehat atau KIS) dan pendidikan (Kartu Indonesia Pintar atau KIP). Program-program ini dianggap lebih efektif karena secara langsung menyasar mereka yang kurang mampu membayar biaya kesehatan dan pendidikannya. Sementara itu, program asuransi pertanian (Asuransi Usaha Tani Padi atau AUTP) dapat mengurangi risiko kehilangan pendapatan akibat adanya gagal panen (Patunru & Respatiadi, 2017).

Kebijakan perdagangan tidak efektif dalam meningkatkan produktivitas pertanian dalam negeri. Faktanya, kebijakan perdagangan justru akan mendorong tenaga kerja ke sektor pertanian dengan upah yang lebih rendah yang pada akhirnya akan mengurangi produktivitas sektor pertanian. Strategi yang lebih baik untuk meningkatkan produktivitas adalah memprioritaskan program distribusi bibit unggul (Freddy & Gupta, 2018), memperbaiki program subsidi pupuk yang semula kurang efisien (Kompas, 2022), mengatasi hambatan investasi pada sektor pertanian, serta mendorong transfer pengetahuan antara investor asing dan petani lokal (Budiman & Alta, 2022).

> Kebergantungan pada minyak kelapa sawit dan produk-produk turunannya mempersulit akses industri F&B Indonesia ke pasar Eropa yang mendiskriminasi minyak kelapa sawit Indonesia karena dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan.

Karena kebijakan Kemenperin yang dititikberatkan pada industri hulu, Indonesia menjadi semakin bergantung pada minyak kelapa sawit. Kebergantungan pada minyak kelapa sawit dan produk-produk turunannya mempersulit akses industri F&B Indonesia ke pasar Eropa yang mendiskriminasi minyak kelapa sawit Indonesia karena dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan (Neo, 2022). Dengan kata lain, pembatasan impor untuk mendukung sektor minyak kelapa sawit pada akhirnya mempersulit pelaku usaha F&B lainnya untuk berekspansi ke pasar ekspor.

Amanta dan Wibisono (2021) berpendapat bahwa membatasi perdagangan melalui hambatan-hambatan non-tarif juga merugikan masyarakat berpendapatan rendah. Barang impor akan dibeli karena harganya lebih murah, dan perdagangan dapat membuka akses konsumen terhadap pangan

murah tersebut. Dalam hal ini, liberalisasi perdagangan memungkinkan masyarakat kurang mampu untuk mengurangi pengeluaran sembari mempertahankan tingkat konsumsi mereka. Perdagangan juga dikaitkan dengan diversifikasi pasokan pangan karena berbagai jenis makanan akan tersedia apabila kebijakan perdagangan dalam negeri bersifat terbuka (FAO, 2016). Maka dari itu, pembatasan perdagangan, baik melalui hambatan tarif maupun non-tarif, akan membatasi akses terhadap jenis makanan yang lebih beragam dan sehat. Selain itu, apabila Indonesia terus menerapkan hambatan perdagangan, hal tersebut akan mendorong negara lain untuk mengambil kebijakan serupa yang pada akhirnya akan meningkatkan harga pangan.

Lemahnya partisipasi ke belakang Indonesia dalam GVC

Kebijakan ekonomi Indonesia telah menjadi lebih proteksionis setidaknya sejak 2000-an akhir (Patunru & Rahardja, 2015; Patunru, 2018; Pane & Hill 2018). Tujuan terkini Kemenperin adalah mengurangi impor tidak hanya untuk sektor F&B, tetapi juga sektor manufaktur secara umum (Gupta, Gretton, & Patunru, 2022). Inilah yang menyebabkan kurang optimalnya partisipasi ke belakang Indonesia dalam rantai nilai global.

Partisipasi ke belakang Indonesia dipicu oleh berkurangnya input asing dalam produk-produk ekspor Indonesia, kurang optimalnya kinerja UMK, dan kecenderungan Indonesia berpartisipasi dalam GVC sederhana (GVC yang melewati batas negara sebanyak satu kali) daripada GVC yang bersifat kompleks (GVC yang melewati batas negara lebih dari satu kali).

Peran input asing dalam produk ekspor Indonesia (Partisipasi ke belakang GVC) mengalami penurunan baik di industri berteknologi rendah maupun menengah-tinggi. Antara tahun 2000 hingga 2017, lebih dari 80% barang antara yang digunakan dalam produksi barang jadi Indonesia diperoleh secara domestik (ADB, 2019). Produk antara industri berteknologi rendah seperti F&B, karet, tekstil, dan plastik sebagian besar berasal dari sumber daya alam domestik seiring dengan kebijakan proteksionis yang diterapkan Kemenperin. Antara tahun 2005 hingga 2015, industri minyak dan lemak mayoritas menggunakan input kelapa sawit lokal, sehingga proporsi komponen input antara impor dalam produk ekspor Indonesia berkurang dari sekitar 12% menjadi 8%. Penurunan ini selain membatasi akses industri terhadap barang antara yang lebih murah juga menghapus peluang industri untuk menghasilkan produk akhir yang lebih berkualitas.

Partisipasi ke belakang dalam GVC juga rendah karena pelaku UMK—terutama di sektor F&B—menghadapi hambatan dalam mengekspor produk-produknya (Ahmad, 2021). Meskipun jumlah UMK di Indonesia sangat banyak, mereka hanya menyumbang 14,4% dari total ekspor Indonesia pada 2019 (MSCO, 2020). Secara umum, produk-produk UMK juga kesulitan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan produk dari mitra dagang internasionalnya.

Untuk memperbaiki kualitas produknya, UMK membutuhkan pembiayaan untuk pengembangan teknologi dan sumber daya manusia. Sayangnya, UMK di Indonesia kerap mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses kredit dari bank. Di bulan Maret 2020, UMK hanya mampu mengakses 19,68% dari total kredit yang ditawarkan perbankan, sementara sisanya diakses oleh perusahaan-perusahaan berskala menengah dan besar (Ahmad, 2021). Penyebabnya adalah masih banyak UMK yang tidak memiliki agunan sebagaimana disyaratkan oleh bank. Selain itu, banyak UMK

tidak memiliki rencana usaha yang formal dan dokumen lainnya untuk mengajukan pinjaman bank, sehingga mengurangi kelayakan mereka dalam memperoleh pinjaman (Ahmad, 2021).

Yang terakhir, Indonesia cenderung berpartisipasi dalam GVC sederhana, yaitu GVC yang melewati batas negara sebanyak satu kali dibandingkan GVC yang bersifat kompleks (ADB, 2019). Ini berarti bahwa sebagian besar nilai tambah domestik Indonesia digunakan oleh para importir luar negeri dalam memproduksi produk jadi (partisipasi ke depan) untuk tujuan konsumsi domestik, dan bukan untuk diekspor kembali ke negara lain. Selain itu, lebih dari separuh (58%) partisipasi ke belakang dalam rantai nilai global adalah GVC sederhana, yang mengindikasikan bahwa impor barang antara digunakan dalam produksi barang jadi sebagian besarnyaa digunakan untuk konsumsi domestik, alih-alih untuk tujuan ekspor. GVC sederhana membatasi perusahaan dalam menikmati manfaat ekspor secara optimal, seperti ekspansi pasar, diversifikasi konsumen, dan harga yang lebih tinggi di pasar global.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Sektor F&B memainkan peran utama dalam pertumbuhan PDB, ekspor, upah, ketenagakerjaan, dan partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia. Inilah mengapa industri F&B dijadikan sektor prioritas oleh Kemenperin. Meski mayoritas input antara untuk sektor F&B diperoleh secara domestik, impornya tetap menjadi penting. Akses terhadap input antara impor memungkinkan perusahaan mendapatkan bahan baku yang lebih murah dan berkualitas, sehingga mendorong produktivitas dan ekspor.

Pengamatan kami menunjukkan bahwa meski tidak memengaruhi pertumbuhan jumlah unit usaha dan tenaga kerja, impor input antara berdampak positif terhadap upah, *output*, nilai tambah per perusahaan, dan nilai tambah per pekerja pada UMK. Tidak adanya pengaruh terhadap jumlah unit usaha berarti bahwa impor tidak menciptakan perusahaan-perusahaan baru, tetapi membuat unit usaha yang ada dan para pekerjanya di UMK lebih kompetitif dan efisien. Selain itu, tidak adanya pengaruh terhadap ketenagakerjaan menyiratkan bahwa pergerakan buruh di UMK terbilang cukup dinamis, dengan karyawan yang mudah beralih dari sektor formal ke sektor informal.

Akan tetapi, kebijakan impor barang setengah jadi masih belum menjadi pilihan yang populer bagi pemerintah Indonesia. Kemenperin sedang berupaya untuk mengurangi kebergantungan terhadap impor barang setengah jadi di sektor F&B secara bertahap melalui kebijakan-kebijakan yang mengurangi impor—atau dengan kata lain, melalui substitusi impor. Bukannya menyokong, pendekatan ini kemungkinan besar justru akan merugikan industri F&B. Lebih jauh lagi, pendekatan ini juga akan membuat Indonesia semakin bergantung pada minyak kelapa sawit dan produk-produk turunannya, sehingga menambah kerentanan Indonesia terhadap volatilitas harga komoditas global, serta membatasi akses industri hilir ke pasar global. Mengingat pentingnya peranan industri F&B dalam perekonomian Indonesia, kebijakan Kemenperin yang membatasi akses terhadap impor input antara perlu dievaluasi kembali.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

- Pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan substitusi impor dalam produksi pangan. Jika ingin meningkatkan manufaktur F&B, pemerintah seyogianya menambah impor input antara, bukan sebaliknya.

- Pemerintah perlu mengkaji dampak kebijakan perdagangan terhadap manufaktur F&B. Kami tidak melihat adanya studi yang dilakukan untuk mendukung alasan di balik target pengurangan impor pemerintah. Pemerintah harus setidaknya memberikan alasan mengapa target pengurangan impor dipasangkan dengan target pertumbuhan industri F&B, karena kenyataannya kedua tujuan ini saling bertolak belakang, terutama untuk UMK. Makalah ini memberikan temuan-temuan awal yang menunjukkan bahwa alih-alih mendukung sektor F&B, pendekatan yang saat ini digunakan oleh pemerintah menciptakan risiko bagi industri F&B. Kualitas data yang lebih baik dibutuhkan untuk memberi wawasan yang lebih komprehensif.

- Dalam mengumpulkan dan menyediakan datanya, pemerintah perlu memisahkan minyak kelapa sawit serta produk turunannya dari produk lainnya di industri F&B. Data minyak kelapa sawit yang digabungkan dengan data sektor F&B secara umum dapat menghasilkan interpretasi yang keliru bagi pemerintah, sehingga menutupi pentingnya impor bagi kesehatan dan pertumbuhan sektor ini.

- Pemerintah perlu meningkatkan kapasitasnya terkait pengumpulan data dan kepakaran dalam proses diseminasi data. Meski data-data sebelumnya memiliki kualitas yang sangat baik, terutama basis data Survei Industri (SI) atau survei Industri Besar Sedang (IBS), Márquez-Ramos (2020) dan temuan kami (lihat Lampiran) menunjukkan bahwa ada masalah dalam kualitas basis data SI/IBS dan akses terhadap data-datanya (lihat Lampiran).

- Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala (*real-time*) atas Neraca Komoditas dan kebijakan-kebijakan hilir domestiknya dan memastikan bahwa temuan-temuannya dibagikan secara publik. Selain itu, membatasi perdagangan bukanlah cara terbaik untuk membantu industri hulu.

- Untuk membantu petani, pemerintah perlu menempuh kebijakan proteksionisnya melalui kebijakan lain di luar kebijakan perdagangan. Upaya ini dapat berupa perbaikan teknologi, peningkatan kualitas SDM, transfer teknologi, peningkatan pengumpulan data produksi, bantuan langsung tunai, serta kebijakan-kebijakan lainnya yang dapat mendorong produktivitas.

REFERENSI

Ahmad, T. (2021). Indonesian Global Value Chain Policy: Learning from China's Experiences. United Nations Conference on Trade and Development. https://unctad.org/system/files/official-document/BRI-Project_RP09_en.pdf

Alatas, V., & Newhouse, D. (2010). Indonesia jobs report: Toward better jobs and security for all. Washington, DC: Main Report, World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/27901

Amanta, F. & Gupta, K. (2022). Trade for Economic Recovery: Import Policies to Support Indonesia's F&B Sector. Center for Indonesian Policy Studies Policy Paper No. 51. https://www.cips-indonesia.org/publications/trade-for-economic-recovery%3A-import-policies-to-support-indonesia%E2%80%99s-f%26b-sector

Amanta, F. & Wibisono, I.D. (2021). Negative Effects of Non-Tariff Trade Barriers on the Welfare of Indonesians. Center for Indonesian Policy Studies Discussion Paper No. 10. https://c95e5d29-0df6-4d6f-8801-1d6926c32107.usrfiles.com/ugd/c95e5d_0fd486c3bb9347aeb156cc80580858b8.pdf

Amitl, M. and Konings, J. (2007), Trade Liberalization, Intermediate Inputs and Productivity. American Economic Review. Vol. 97. pp. 1611-1638. https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.97.5.1611

Amity, M. & Davis, D.R. (2009). What's Behind Volatile Import Prices from China? Current Issues in Economics and Finance. Vol. 15. No. 1. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1327098

Amiti, M. & Davis, D.R. (2012). Trade, Firms, and Wages: Theory and Evidence. The Review of Economic Studies. Vol. 79. No. 1. pp. 1-36. https://www.jstor.org/stable/41407043

Amiti, M. and Cameron, L. (2012). Trade Liberalization and the Wage Skill Premium: Evidence from Indonesia. Journal of International Economics. Vol. 87. pp. 277-287. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022199612000104?via%3Dihub

Antràs, P. (2020). Conceptual Aspects of Global Value Chains. The World Bank Economic Review, 34(3), 551-574. https://doi.org/10.1093/wber/lhaa006

Aryan, M.H. (2022). KPK Terima Aduan Dugaan Korupsi Impor Bawang Putih. Detik.com. 30 June 2022. https://news.detik.com/berita/d-6155186/kpk-terima-aduan-dugaan-korupsi-impor-bawang-putih

ASEAN. (2022). Decent Work and Protecting Informal Workers (ASEAN, Ed.). *The ASEAN*, (21), 6-12. https://asean.org/wp-content/uploads/2022/05/The-ASEAN-Magazine-Issue-21-2022-Informal-Economy.pdf.

Asian Development Bank (2019). The Evolution of Indonesia's Participation in Global Value Chains. Manila. Asian Development Bank. http://dx.doi.org/10.22617/SPR190493-2.

Asian Development Bank. (2021). *Reaping the benefits of industry 4.0 through skills development in Indonesia*. Asian Development Bank, Manilla. http://hdl.voced.edu.au/10707/564702.

Asian Development Bank. (2022) Informal Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises and Digitalization: Evidence from Surveys in Indonesia. Asian Development Bank Institute. https://www.adb.org/sites/default/files/publication/783706/adb-wp1310.pdf.

Badan Pusat Statistik. (2019). Food and beverage service activities. https://www.bps.go.id/publication/2021/08/18/6ec5e82a11ec09a289528554/statistik-penyedia-makan-minum-2019.html

Badan Pusat Statistik. (2021a). Berita Resmi Statistik. 5 Februari 2021. https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20210205095341.pdf.

Badan Pusat Statistik. (2021b). Value of exports by SITC group (Million US$), 2019-2021. https://www.bps.go.id/

indicator/8/1494/1/value-of-exports-by-sitc-group.html.

Badan Pusat Statistik. (2021c). Berita Resmi Statistik 5 Agustus 2021. https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20210805115129.pdf.

Badan Pusat Statistik. (2022a). Profile of Micro and Small Industry 2020. https://www.bps.go.id/publication/2022/03/04/a6375ea4a72374e3bedd0b00/profile-of-micro-and-small-industry-2020.html.
Badan Pusat Statistik. (2022b). Statistical Yearbook of 2022. https://www.bps.go.id/publication/2022/02/25/0a2afea4fab72a5d052cb315/statistik-indonesia-2022.html.

Badan Pusat Statistik. (2022c). The proportion of Informal Employment in Total Employment by Sex 2019-2021. https://www.bps.go.id/indicator/6/2155/1/proportion-of-informal-employment-in-total-employment-by-sex.html.

Bank Dunia. (2020). *World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains*. Washington, DC: World Bank.

Budiman, I. & Alta, A. (2022). Technology and Knowledge Transfers to Dairy Farms Private Sector Contribution to Improve Milk Production. Center for Indonesian Policy Studies Policy Paper No. 52. https://www.google.com/url?q=https://www.cips-indonesia.org/publications/technology-and-knowledge-transfers-to-dairy-farms%253A-private-sector-contribution-to-improve-milk-production&sa=D&source=docs&ust=1667590968821709&usg=AOvVaw3xTdOYQG6cieBFZ6_9uTgY

Contreras Suarez, D., Cameron, L., The Australian-Indonesian Partnership for Economic Governance, The Australian Department of Foreign Affairs and Trade, Monash University, & CDES. (2017). *Women's Economic Participation in Indonesia: A study of gender inequality in employment, entrepreneurship, and key enablers for change*. https://www.monash.edu/business/cdes/assets/documents/publications2/Womens-economic-participation-in-Indonesia-June-2017.pdf.

Dirgantara, A. (2022). Kasus Korupsi Impor Garam, Modus Tersangka Cari Keuntungan Pribadi. Kompas.com. 4 November 2022. https://nasional.kompas.com/read/2022/11/04/10511831/kasus-korupsi-impor-garam-modus-tersangka-cari-keuntungan-pribadi

Fane, G., & Warr, P. (2008). Agricultural protection in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 44(1), 133-150. https://doi.org/10.1080/00074910802001611

FAO. (2016). Nutrition in the trade and food security nexus. https://www.fao.org/3/i5223e/i5223e.pdf

Fauzi, A. (2016). Komisi IV DPR Soroti Perbedaan Data Impor Jagung di Dua Kementerian. Kompas. 25 April 2016. https://money.kompas.com/read/2016/04/25/213000926/Komisi.IV.DPR.Soroti.Perbedaan.Data.Impor.Jagung.di.Dua.Kementerian

Fredy, I.K, & Gupta, G.E.K. (2018). Strengthening Food Security Policy: Reforms on Hybrid Maize Seeds Delivery Mechanism. Center for Indonesian Policy Studies Policy Paper No. 15. https://www.google.com/url?q=https://www.cips-indonesia.org/publications/strengthening-food-security-policy%253A-reforms-on-hybrid-maize-seeds-delivery-mechanism&sa=D&source=docs&ust=1667590968821552&usg=AOvVaw0LX8YRap-Wp3tkDNuCVRjLR

Glorya, M.J. & Nugraha, A. (2019). Inisiatif Sektor Swasta untuk Meningkatkan Produktivitas Kakao, Kopi, dan Karet di Indonesia. Center for Indonesian Policy Studies Policy Paper No. 8. https://c95e5d29-0df6-4d6f-8801-1d6926c32107.usrfiles.com/ugd/c95e5d_c3ab8716343d4aada10128724ad3b76c.pdf

Grup Bank Dunia & Bappenas. (2020). Indonesia's occupational employment outlook: 2020 technical report. https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy_Paper/Occupational_Employment_Outlook_TREnglish.pdf.

Gupta, K. (2021). The Importance of Financial Liberalisation to Economic Growth: The Case of Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 57(02), 175-201. https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1747596

Gupta, K., Gretton, P., & Patunru, A. (2022). *Projecting the long run impact of an economic reform: the case of the*

Indonesian Omnibus Law and concurrent changes in trade policy (Presented during the 25th Annual Conference on Global Economic Analysis (Virtual Conference)). Purdue University, West Lafayette, IN: Global Trade Analysis Project (GTAP). Retrieved from https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/res_display.asp?RecordID=6583

Gupta, K., Pane, D., & Pasaribu, D. (2022). The Advent of A New Trade Governance After The Omnibus Law: Neraca Komoditas. https://www.cips-indonesia.org/neraca-komoditas-policy-paper

Hidayat, A.R. (2022). Pupuk Subsidi Diincar sejak Perencanaan (Subsidized Fertilizer Has Been Targeted Since the Planning Stage. Kompas. 28 Januari 2022. https://www.google.com/url?q=https://www.kompas.id/baca/investigasi/2022/01/27/pupuk-subsidi-diincar-sejak-perencanaan&sa=D&source=docs&ust=1667590968821790&usg=AOvVaw0OxcppSrGeCbDuwf1IiL-7

Kahkonen, S. (2021, March 08). Why women matter for Indonesia's economic recovery. World Bank Blogs. https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/why-women-matter-indonesias-economic-recovery.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (t.t.). Profil Komoditas Minyak Goreng. https://ews.kemendag.go.id/sp2kp-landing/assets/pdf/120116_ANK_PKM_DSK_Minyak.pdf

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2016). Industry Facts & Figures. https://kemenperin.go.id/majalah/11/facts-and-figures-industri-indonesia

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2020). The strategic plan. https://kemenperin.go.id/download/24297/Rencana-Strategis-.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (2021). Supplying Food Through the Pandemic, Contribution of Food and Beverage Skyrocketed. Press release. 7 August 2021. https://kemenperin.go.id/artikel/22682/Pasok-Kebutuhan-Pangan-Selama-Pandemi,-Kontribusi-Industri-Mamin-Meroket%20%20%20#:~:text=Industri%20makanan%20dan%20minuman%20(mamin,nasional%20mencapai%206%2C66%25.

Kis-Katos, K., Pieters, J., & Sparrow, R. (2018). Globalization and Social Change: Gender-Specific Effects of Trade Liberalization in Indonesia. IMF Economic Review, 66(4), 763-793. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1057/s41308-018-0065-5

Kis-Katos, K., & Sparrow, R. (2015). Poverty, labor markets and trade liberalization in Indonesia. Journal of Development Economics, 117, 94-106. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2015.07.005

Levinsohn, J., & Petrin, A. (2003). Estimating Production Functions Using Inputs to Control for Unobservables. The Review of Economic Studies, 70(2), 317-341. https://doi.org/10.1111/1467-937x.00246

Loayza, N. V., & Rigolini, J. (2011). Informal employment: Safety net or growth engine? World Development, 39, 1503–1515. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X11000222.

Márquez-Ramos, L. (2020). A Survey of Papers Using Indonesian Firm-Level Data: Research Questions and Insights for Novel Policy-Relevant Research in Economics. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 1-49. https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1862410

Ministry of Cooperative and Micro and Small Enterprises Republic of Indonesia. (2020). The Strategic Plan. https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1600168483_RENSTRA%202020-2024%20OK.pdf

Melitz, M.J. (2003). The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity. Econometrica, Vol. 71. No. 6. pp. 1695–1725. https://scholar.harvard.edu/files/melitz/files/aggprod_ecma.pdf

Monash. (2017). Women's economic participation in Indonesia: A study of gender inequality in employment, entrepreneurship, and key enablers for change. https://www.monash.edu/business/cdes/assets/documents/publications2/Womens-economic-participation-in-Indonesia-June-2017.pdf.

Muhid, H.K. (2022). 4 Jawara Produsen Minyak Goreng di Indonesia. Tempo.co. 1 February 2022. https://bisnis.tempo.co/read/1556268/4-jawara-produsen-minyak-goreng-di-indonesia

Natsiopoulos K, Tzeremes NG (2022a). "ARDL bounds test for cointegration: Replicating the Pesaran et al. (2001)

results for the UK earnings equation using R." *Journal of Applied Econometrics*. doi:10.1002/jae.2919, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jae.2919.

Natsiopoulos K, Tzeremes N (2022b). *ARDL: ARDL, ECM and Bounds-Test for Cointegration*. R package version 0.2.0, https://CRAN.R-project.org/package=ARDL.

Oxford Economics. (2021). The economic impact of the agri-food sector in Indonesia. Food Industry Asia. https://foodindustry.asia/hubfs/Resources/Trade%20and%20Harmonisation/The%20Economic%20Impact%20of%20the%20Agri-food%20Sector%20in%20Southeast%20Asia%20-%20Indonesia.pdf?hsLang=en.

Neo, P. (2020). 'Palm Oil Has No Alternative': European Supply Chain Expert Calls Out EU for 'Discriminatory' Policies. Foodnavigator-Asia.com. 07 March 2022. https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2022/03/07/european-supply-chain-expert-calls-out-eu-for-discriminatory-palm-oil-policies

Ni'am, S. (2022). Sidang Korupsi Minyak Goreng, Eks Dirjen Kemendag Didakwa Rugikan Negara Rp 18,3 Triliun. Kompas. 31 August 2022. https://nasional.kompas.com/read/2022/08/31/13465761/sidang-korupsi-minyak-goreng-eks-dirjen-kemendag-didakwa-rugikan-negara-rp

Nindita, H. (2021). Terbukti Korupsi Kasus Suap Ekspor Benih Lobster, Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun Penjara. Kompas. 15 July 2021. https://www.kompas.tv/article/192990/terbukti-korupsi-kasus-suap-ekspor-benih-lobster-edhy-prabowo-divonis-5-tahun-penjara

Pane, D. D., & Patunru, A. A. (2021). Does Export Experience Improve Firms' Productivity? Evidence from Indonesia. The Journal of Development Studies, 57(12), 2156-2176. https://doi.org/10.1080/00220388.2021.1965126

Pane, D. & Hill, H. (2018). Indonesia and the Global Economy: Missed Opportunities.?. Indonesia in the New World: Globalisation, Nationalism and Sovereignty. https://www.degruyter.com/document/doi/10.1355/9789814818230-019/html

Patunru, A. (2018). Rising Economic Nationalism in Indonesia. Journal of Southeast Asian Economies, 35(3), 335-354. https://doi.org/10.1355/ae35-3b

Patunru, A. A. & Rahardja, S. (2015). *Trade Protectionism in Indonesia: Bad Times and Bad Policy*. Lowy Institute for International Policy. http://hdl.handle.net/11540/6410.

Patunru, A.A, & Ilman, A.S. (2019). Ekonomi Politik Kebijakan Beras di Indonesia: Perspektif Masyarakat Ekonomi ASEAN. Center for Indonesian Policy Studies Policy Paper No. 6. https://c95e5d29-0df6-4d6f-8801-1d6926c32107.usrfiles.com/ugd/c95e5d_3746e6bfbb2844b7bf5774c648b1dc42.pdf

Patunru, A.A & Respatiadi, H. (2017). Perlindungan bagi Petani: Upaya Peningkatan Kualitas Program Perlindungan Sosial bagi Para Pekerja di Sektor Pertanian di Indonesia. Center for Indonesian Policy Studies Policy Paper No. 9. https://c95e5d29-0df6-4d6f-8801-1d6926c32107.usrfiles.com/ugd/c95e5d_eba691330a3b432ba48b77312175eb6e.pdf

Persada, S. (2020). Suap Impor Gula, KPK Tuntut Eks Bos PTPN III 6 Tahun Penjara. Tempo.co. 13 May 2020. https://nasional.tempo.co/read/1341932/suap-impor-gula-kpk-tuntut-eks-bos-ptpn-iii-6-tahun-penjara

Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 68(1), 79-113. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-4076(94)01644-F

Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. http://www.jstor.org.virtual.anu.edu.au/stable/2678547

Rothenberg, A.D., Gaduh, A., Burger, N.E., Chazali, C., Tjandraningsih, I., Radikun, R., Sutera, C., & Weilant, S. (2016). Rethinking Indonesia's Informal Sector. World Development. Vol. 80. pp 96-113. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.11.005

Ruslan, K. (2019). Improving Indonesia's Food Statistics through the Area Sampling Frame Method. Center for Indonesian Policy Studies Discussion Paper No. 7. https://www.google.com/url?q=https://www.cips-indonesia.org/publications/improving-indonesia%25E2%2580%2599s-food-statistics-through-the-area-sampling-

frame-method&sa=D&source=docs&ust=1667590968821867&usg=AOvVaw2dxKOgypQaIC-MOydvZNDI

Scoppola, M. (2021). Globalisation in agriculture and food: the role of multinational enterprises. European Review of Agricultural Economics, 48(4), 741-784. https://doi.org/10.1093/erae/jbab032

Tempo.co. (2022). 4 Jawara Produsen Minyak Goreng di Indonesia. Tempo. https://bisnis.tempo.co/read/1556268/4-jawara-produsen-minyak-goreng-di-indonesia

UNICEF, UNDP, Prospera, and SMERU. (2021). Analysis of the Social and Economic Impacts of COVID-19 on Households and Strategic Policy Recommendations for Indonesia, Jakarta. https://www.unicef.org/indonesia/coronavirus/reports/socio-economic-impact-covid-19-households-indonesia

LAMPIRAN

Untuk meneliti hubungan antara impor input antara Indonesia dengan kinerja ketenagakerjaan dan upah industri F&B, data input antara industri pangan dikumpulkan dari basis data UN COMTRADE menggunakan klasifikasi BEC Rev. 4 (Amanta & Gupta, 2022). Melimpahnya data perdagangan dan sistem klasifikasi dapat menghasilkan tingkat analisis yang lebih terperinci. Dengan kata lain, data perdagangan memungkinkan analis untuk memisahkan barang-barang tertentu seperti produk-produk turunan minyak kelapa sawit dari barang mentah, input antara, dan barang jadi. Namun, mengandalkan data perdagangan saja tidak bisa mencerminkan keadaan secara menyeluruh, terutama di negara dengan pasar domestik yang relatif besar seperti Indonesia. Bukti yang lebih kuat membutuhkan data industri yang lebih spesifik dan bahkan hingga data tingkat perusahaan (Antras, 2020).

Untuk informasi terkait industri F&B, makalah ini menggunakan data yang tersedia secara gratis dari Badan Pusat Statistik (BPS). BPS menyediakan data tingkat industri, beberapa di antaranya adalah data output, nilai tambah, biaya tenaga kerja, jumlah perusahaan, dan jumlah pekerja. Informasi ini merupakan data agregat dari survei perusahaan tahunan bernama Survei Industri dalam tingkat agregasi ISIC 2 digit (Márquez-Ramos, 2020). Dengan tingkat agregasi ini, kami dapat mengamati industri F&B.

Yang menjadi masalah dalam agregasi ini adalah kami tidak dapat mengecualikan manufaktur minyak kelapa sawit dari set data. Karena produk-produk turunan minyak kelapa sawit mendominasi industri pangan dan manufaktur minyak goreng membutuhkan sedikit sekali impor input antara, pentingnya impor input antara bagi industri pangan non-minyak kelapa sawit menjadi tersamarkan.

Pendekatan terbaik kedua adalah mengestimasi hubungan antara impor input antara dengan UMK. Manufaktur minyak goreng adalah industri yang membutuhkan modal dengan jumlah relatif besar dengan margin rendah yang diuntungkan oleh skala ekonomi, sehingga hampir separuh pangsa pasarnya didominasi oleh empat perusahaan besar (Muhid, 2022). Kami berasumsi bahwa produksi minyak goreng memainkan peran yang dalam UMK, dan dampak impor input antara akan cukup kuat ketika diteliti pada UMK.

Sejak Melitz (2003), para ekonom telah banyak meneliti dampak heterogen perdagangan terhadap perusahaan dan menemukan bahwa dampak perdagangan sangat bervariasi antara perusahaan kecil yang kurang produktif dengan perusahaan besar yang lebih produktif. Perusahaan-perusahaan kecil lebih kesulitan beradaptasi dengan volatilitas kebijakan perdagangan, sementara perusahaan-perusahaan besar lebih mampu menghadapi restriksi perdagangan. Gupta (2021) membuktikan hal tersebut dalam kasus Indonesia.

Tabel 4.
Data agregat industri makanan dan minuman untuk perusahaan-perusahaan berskala mikro dan kecil, dalam miliar rupiah

Year	Jumlah Perusahaan (dalam 1.000 unit)		Total Jumlah Tenaga Kerja (dalam 1.000 orang)		Total *Output*		Total Nilai Tambah		Total Biaya Tenaga Kerja	
	Kecil	Mikro	Kecil	Mikro	Kecil	Mikro	Kecil	Mikro	Kecil	Mikro
2010	49	911	351	44.244	18.155	44.244	12.219	28.783	1.879	1.873
2011	120	905	932	11.035	15.346	11.035	4.412	3.976	1.347	362
2012	73	923	609	55.135	40.731	55.135	14.792	19.515	5.688	5.926
2013	161	1.054	1.263	76.679	120.725	76.679	36.986	23.869	14.854	5.252
2014	74	1.169	584	100.689	76.414	100.689	18.966	33.345	5.117	3.912
2015	95	1.519	749	138.838	113.161	138.838	30.443	49.738	8.488	6.241
2017	73	1.600	584	132.902	63.439	132.902	18.546	52.727	6.073	6.768
2018	62	1.794	449	166.686	54.953	166.686	17.112	54.989	5.151	6.908
2019	43	1.643	348	141.343	62.382	141.343	15.332	56.491	4.836	7.642
2020	53	1.559	401	119.050	54.913	119.050	16.474	46.415	5.278	6.271

Sumber: BPS

Kami menggunakan estimasi *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) (Pesaran & Smith, 1995; Pesaran, Shin, & Smith, 2001) untuk mengevaluasi dampak impor input antara terhadap industri pangan yang diagregasi dari perusahaan-perusahaan berskala mikro dan kecil. Kami menggunakan total *output* industri, total nilai tambah industri, rerata nilai tambah per perusahaan, rerata nilai tambah per pekerja, dan rerata upah industri sebagai variabel dependen. Variable independennya adalah impor input antara. Semua variable ditransformasikan menjadi bentuk log. Kami menggunakan perangkat lunak R untuk menjalankan ARDL memakai paket ARDL (Natsiopoulos & Tzeremes, 2022a; Natsiopoulos & Tzeremes, 2022b).

Kami menjalankan ARDL untuk industri F&B yang diagregasi dari perusahaan-perusahaan berskala menengah dan besar, kecil, dan mikro. Kami tidak menemukan adanya pengaruh yang signifikan dalam impor input antara terhadap usaha berskala menengah dan besar, sesuai dengan harapan kami karena kami berasumsi bahwa minyak kelapa sawit mendominasi perusahaan-perusahaan besar dan sedang. Sementara itu, kami menemukan hasil yang signifikan secara statistik dari dampak tertunda satu tahun (*one-year lagged*) oleh impor input antara terhadap lima variabel dependen—peningkatan dalam impor input antara berkorelasi dengan peningkatan *output*, nilai tambah, dan upah setahun kemudian. Kami merangkum hasil ini pada Tabel 5.

Tabel 5.
Koefisien ARDL untuk perusahaan-perusahaan berskala kecil dan mikro pada variabel-variabel terpilih

Variabel	Perusahaan Kecil	Perusahaan Mikro
output	2,73	4,53
ketenagakerjaan	-1,30	0,36
jumlah perusahaan	-1,25	0,33
nilai tambah	3,25	4,92
nilai tambah per perusahaan	4,52	4,01
nilai tambah per pekerja	4,5	4,09
upah	4,4	5,07

Untuk perusahaan kecil di industri F&B, peningkatan sebesar 1% dalam impor input antara meningkatkan output sebesar 2,73% di tahun berikutnya. Peningkatan impor input antara sebesar 1% meningkatkan *output* sebesar 4,53% untuk perusahaan mikro di tahun berikutnya. Nilai tambah industri meningkat lebih banyak daripada *output,* yaitu sebesar 3,25% untuk perusahaan kecil dan 4,92% untuk perusahaan mikro.

Peningkatan-peningkatan ini bisa jadi disebabkan oleh peningkatan margin ekstensif, dimana lebih banyak perusahaan dapat memasuki pasar untuk memproduksi produk-produk F&B, atau oleh peningkatan margin intensif, yang artinya setiap perusahaan menjadi lebih produktif. Untuk memeriksa dampak ini, kami menggunakan nilai tambah per perusahaan dan per pekerja. Kami menemukan peningkatan dalam margin intensif. Peningkatan sebesar 1% dalam impor input antara meningkatkan rerata nilai tambah per perusahaan sebesar 4,52% untuk perusahaan kecil dan 4,01% untuk perusahaan mikro di tahun berikutnya. Untuk nilai tambah per pekerja, peningkatannya adalah sebesar 4,50% untuk perusahaan kecil dan 4,09% untuk perusahaan mikro[11].

Yang terakhir, kami meneliti hubungan antara impor input antara dengan rerata upah perusahaan mikro dan kecil. Kami menemukan bahwa peningkatan sebesar 1% dalam impor input antara meningkatkan rerata upah sebesar 4,4% untuk industri kecil dan 5,07% untuk industri mikro di tahun berikutnya[12]. Akses terhadap input antara impor mengurangi biaya produksi dan membuka akses ke input yang lebih berkualitas, sehingga perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas dan upah pekerjanya. Meningkatnya produktivitas juga menambah daya saing perusahaan di pasar global, sehingga mereka memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menjadi eksportir.

[11] Perlu dicatat bahwa angka per pekerja dan per perusahaan jauh lebih tinggi untuk industri perusahaan kecil dibandingkan nilai tambah industri. Jumlah perusahaan pada industri perusahaan kecil lebih volatil dibandingkan jumlah perusahaan mikro (lihat Tabel 4). Terdapat kemungkinan bahwa keluar dan masuknya perusahaan-perusahaan kecil lebih volatil (antara naik menjadi perusahaan berskala menengah atau turun menjadi perusahaan berskala mikro).
[12] Perlu dicatat bahwa jumlah tenaga kerja dan biayanya digabungkan dari perusahaan-perusahaan mikro dan kecil. Angka-angka ini mungkin tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya karena banyak perusahaan mikro dan kecil tidak memiliki pekerja.

Dampak *lagged* dari input antara terhadap UMK dapat mencerminkan keterbatasan kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan perubahan kebijakan perdagangan. Perusahaan kecil lebih terdampak oleh kebijakan perdagangan dibandingkan perusahaan besar (Melitz, 2003; Gupta, 2022). Dalam kasus kami, perusahaan-perusahaan kecil umumnya tidak mengimpor barang antara secara langsung dan menjadi pengikut harga (price taker) di pasar domestik.

Hasil kami mendukung argumen yang dibuat oleh Amanta dan Gupta (2022) bahwa manfaat impor input antara sebagian besar dirasakan oleh ekonomi domestik. Dampak-dampak ini cukup signifikan, khususnya bagi para UMK di industri F&B. Temuan kami melengkapi bukti-bukti yang ditemukan dalam literatur terdahulu terkait manfaat impor input antara bagi industri manufaktur Indonesia (Kis-Katos & Sparrow, 2015; Kis-Katos, Pieters, & Sparrow, 2018; Pane & Patunru, 2021; Amiti & Konings, 2007; Amiti & Davis, 2012; Gupta, 2021).

Selain itu, hasil kami mengonfirmasi pentingnya memisahkan produk-produk turunan minyak kelapa sawit dari sektor F&B lainnya ketika menganalisis industri F&B Indonesia. Minyak kelapa sawit adalah industri yang sangat besar yang tidak terlalu membutuhkan impor. Ditambah lagi, industri sawit adalah industri hulu. Di bagian hilir industri F&B, impor input antara sifatnya lebih penting, dan minyak kelapa sawit bukanlah variabel yang terpenting. Misalnya, minyak kelapa sawit dapat digunakan dalam produksi mi instan untuk menggoreng adonannya, tetapi produksi mi instan juga membutuhkan bahan-bahan lain seperti gandum, garam, bawang putih, dan bubuk cabai, yang semuanya adalah produk-produk impor.

Demi mengurangi ekposur terhadap harga komoditas yang volatil dan meningkatkan nilai tambah domestik dalam industri F&B, kita perlu menilik data industri hingga ke tingkat yang lebih terperinci dibandingkan sekadar melihat data industri F&B secara agregat (yakni, tingkat ISIC-2 digit). Ini perlu dilakukaan mengingat karakteristik industri (khususnya di tingkat hilir) bisa jadi berbeda-beda.

Data

Indonesia memiliki salah satu basis data tingkat perusahaan yang berkualitas di dunia bernama Survei Industri. Survei Industri memudahkan penelitian bidang ekonomi di industri manufaktur Indonesia (Marquez-Ramos, 2020). Survei Industri merupakan produk dari otoritas nasional yang berwenang melakukan pengumpulan dan diseminasi data bernama Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam situs webnya yang mudah diakses oleh siapa pun, BPS menyediakan informasi agregat yang substansial mengenai industri manufaktur Indonesia. Informasi tersebut meliputi *output*, nilai tambah, bayaran pekerja (upah), dan jumlah pekerja, semuanya digabungkan dalam tingkat agregasi ISIC 2 digit, atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam istilah bahasa Indonesia.

Tingkat agregasi ISIC 2 digit memungkinkan pemisahan industri makanan (10) dan industri minuman (11) dari industri manufaktur lainnya, sehingga analisis dapat difokuskan pada tingkat sub-sektoral. Sayangnya, tingkat agregasi ISIC 2 digit tidak dapat memisahkan produksi minyak sayur dari industri makanan dan minuman secara umum, yang membutuhkan kode ISI tingkat 5 digit. Analisis industri makanan di tingkat 2 digit saja tidak cukup karena produk-produk turunan minyak kelapa sawit, yang mendominasi industri ini, akan menyamarkan pentingnya peran input antara bagi industri F&B secara keseluruhan.

Sebagian besar publikasi tentang industri manufaktur Indonesia mengambil data dari Survei Industri, yang dapat dibeli langsung dari BPS. Akan tetapi, kami tidak dapat memperoleh data tingkat perusahaan dari BPS dengan detail yang kami butuhkan. Dengan kata lain, meski peneliti yang pada umumnya menggunakan Survei Industri memiliki informasi tingkat perusahaan yang memiliki tingkat disagregasi ISIC 5 digit, kami hanya diperbolehkan membeli data hingga tingkat ISIC 2 digit, sehingga tidak bisa memisahkan industri minyak kelapa sawit. Ini menambah masalah Survei Industri yang dilaporkan mengalami penurunan kualitas (Marquez-Ramos, 2020).

Selain diagregasi pada data tingkat industri dengan agregasi ISIC 2 digit, informasi di situs web BPS juga membedakan agregasi berdasarkan tiga jenis ukuran perusahaan: perusahaan berskala mikro, kecil, dan menengah dan besar (ukuran menengah dan besar digabungkan menjadi satu kategori). Dengan demikian, kami memiliki informasi tentang *output*, biaya tenaga kerja, dan nilai tambah dari industri pangan yang digabungkan dari perusahaan-perusahaan berskala menengah dan besar serta berskala mikro dan kecil. Data industri mikro dan kecil yang tersedia di situs web BPS adalah untuk kurun waktu 2010–2020.

Klasifikasi berdasarkan ukuran perusahaan sendiri tidak memberi kami informasi tentang bagaimana cara memisahkan manufaktur minyak sayur dari industri makanan. Akan tetapi, manufaktur minyak kelapa sawit adalah industri yang memerlukan modal dalam jumlah besar dengan margin rendah, yang membutuhkan jejaring pemasok minyak kelapa sawit yang luas dengan berbagai ukuran perkebunan kelapa sawit. Industri ini membutuhkan produksi berskala besar, sehingga sudah sepantasnya didominasi oleh perusahaan-perusahaan berskala besar (Kemendag, t.t.; Tempo, 2022). Sementara itu, kecil kemungkinannya bagi perusahaan-perusahaan kecil di industri F&B untuk mendominasi produksi minyak kelapa sawit. Meski ini tidak seideal memiliki informasi perusahaan non-minyak kelapa sawit, fokus analisis pada perusahaan berskala mikro dan kecil akan mengurangi bias yang diciptakan oleh produk-produk turunan minyak kelapa sawit.

Di samping itu, adalah hal yang sangat penting untuk memahami bagaimana impor input antara memengaruhi perusahaan-perusahaan berskala mikro dan kecil. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan lebih memengaruhi perusahaan yang lebih kecil karena mereka kurang memiliki kapasitas untuk menghadapi perubahan dalam kebijakan perdagangan (Gupta, 2021). Selain itu, penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa input antara dapat meningkatkan kapasitas perusahaan (Pane & Patunru, 2021), yang merupakan poin krusial jika Indonesia ingin memperbaiki kesejahteraan para UMK.

Metode

Dalam makalah ini, kami menggunakan metode *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) (Pesaran & Smith, 1995; Pesaran, Shin, & Smith, 2001). ARDL adalah sebuah metode yang menunjukkan bagaimana dua atau lebih variabel deret waktu (*time series*) berkorelasi antara satu sama lain. ARDL dapat digunakan pada variabel-variabel yang dinamis, seperti data perdagangan dan industri. Dengan ARDL, kami dapat melihat apakah variabel-variabel yang digunakan memiliki kointegrasi jangka panjang atau tidak. Metode inilah yang juga digunakan oleh Amanta dan Gupta (2022).

Spesifikasi ARDL yang kami gunakan adalah sebagai berikut:

$$y_t=\beta_0+\beta_1\ y_{t-1}+\beta_2\ intm_t+\beta_3\ intm_{t-1}+\mu_t$$

dimana y_t adalah berbagai variabel yang mengukur kinerja industri. Dengan kata lain, kami menggunakan tujuh variabel yang berbeda untuk y_t, yaitu output, jumlah pekerja, jumlah perusahaan, nilai tambah, rerata nilai tambah per perusahaan, rerata nilai tambah per pekerja, dan upah. Sementara itu, *intm* adalah jumlah input antara impor sebagaimana digunakan oleh Amanta dan Gupta (2022). Semua variabel ditransformasikan ke bentuk logaritma untuk mengurangi heterogenitas. Penggunaan operator lag 1 (yakni, t-1) menggugurkan satu observasi (yaitu tahun 2010).

Menggunakan impor sebagai variabel dependen dapat berimplikasi pada *omitted variable bias* karena keputusan untuk mengimpor diambil berdasarkan observasi manajer atas keadaan perusahaan, yang tidak selalu dapat diobservasi oleh peneliti (Levinsohn & Petrin, 2003). Namun, tidak seperti perusahaan-perusahaan besar, UMK biasanya tidak mengimpor secara langsung. Keputusan untuk mengimpor tidak ditentukan manajer perusahaan, sehingga dapat mengurangi bias. Selain itu, kami menggunakan ARDL untuk menangkap autokorelasi yang mungkin ditimbulkan oleh variabel-variabel di luar apa yang menjadi fokus penelitian. Spesifikasi ARDL ini memungkinkan kami menangkap korelasi antara input impor dengan kinerja industri, dan menunjukkan apakah korelasinya palsu (dengan kata lain, berkointegrasi secara jangka panjang).

Hasil

Hasil ARDL disajikan dalam tabel-tabel di bawah ini. Tanda (-1) di samping variabel dependen dan *intm* berarti bahwa variabel tersebut adalah variabel lag satu tahun. Dari tabel-tabel ini, dapat dilihat bahwa semua *lag* satu tahun dari *intm* signifikan di bawah 10%. Input antara memainkan peran besar dalam kinerja industri F&B berskala mikro dan kecil, dan kita dapat melihat dampak satu tahun pasca perubahan dalam impor.

Tabel 6.1
Log *Output*, Usaha Kecil

Prediktor	*Estimasi*	*CI*	*p*
(Intercep)	5,66	-18,48 – 29,81	0,573
output (-1)	0,34	-0,29 – 0,98	0,227
intm	-2,84	-8,99 – 3,32	0,289
intm (-1)	2,73	-0,48 – 5,93	0,08
Observasi	9		
R^2 / R^2 disesuaikan	0,699 / 0,518		

Table 6.2
Log Ketenagakerjaan, Usaha Kecil

Prediktor	*Estimasi*	*CI*	*p*
(Intersep)	19,76	-0,87 – 40,39	0,057
L(lnaker, 1)	0,16	-0,63 – 0,96	0,619
lintm	-2,25	-7,47 – 2,97	0,318
L(lintm, 1)	-1,30	-3,85 – 1,25	0,248
Observasi	9		
R^2 / R^2 disesuaikan	0,506 / 0,210		

Tabel 6.3
Log Jumlah Perusahaan, Usaha Kecil

Prediktor	*Estimasi*	*CI*	*p*
(Intercept)	18.30	-3.13 – 39.73	0.080
L(ln, 1)	0.08	-0.76 – 0.93	0.808
lintm	-2.03	-7.46 – 3.40	0.380
L(lintm, 1)	-1.25	-3.89 – 1.38	0.275
Observations	9		
R^2 / R^2 disesuaikan	0.454 / 0.126		

Table 6.4
Log Nilai Tambah, Usaha Kecil

Prediktor	*Estimasi*	*CI*	*p*
(Intersep)	3,81	-22,80 – 30,41	0,728
L(lva, 1)	0,21	-0,56 – 0,98	0,518
lintm	-2,77	-9,88 – 4,33	0,362
L(lintm, 1)	3,25	-0,02 – 6,51	0,051
Observasi	9		
R^2 / R^2 disesuaikan	0,595 / 0,352		

Tabel 6.5
Log Nilai Tambah Per Perusahaan, Usaha Kecil

Prediktor	*Estimasi*	*CI*	*p*
(Intersep)	-15,82	-31,55 – -0,09	0,049
L(lvan, 1)	0,03	-0,36 – 0,42	0,865
lintm	-0,2	-4,34 – 3,95	0,907
L(lintm, 1)	4,52	2,64 – 6,39	0,002
Observasi	9		
R^2 / R^2 disesuaikan	0,901 / 0,842		

Tabel 6.6
Log Nilai Tambah Per Pekerja, Usaha Kecil

Prediktor	*Estimasi*	*CI*	*p*
(Intersep)	-17,64	-32,75 – -2,54	0,03
L(lvana, 1)	0,04	-0,33 – 0,41	0,793
lintm	0,04	-3,93 – 4,01	0,98
L(lintm, 1)	4,5	2,70 – 6,30	0,001
Observasi	9		
R^2 / R^2 disesuaikan	0,909 / 0,855		

Tabel 6.7
Log Upah, Usaha Kecil

Prediktor	*Estimasi*	*CI*	*p*
(Intersep)	-19,69	-41,19 – 1,82	0,065
L(lw, 1)	-0,05	-0,56 – 0,47	0,828
lintm	0,53	-4,75 – 5,82	0,806
L(lintm, 1)	4,4	2,06 – 6,73	0,005
Observasi	9		
R^2 / R^2 disesuaikan	0,855 / 0,768		

Tabel 6.8
Log *Output*, Usaha Mikro

Prediktor	*Estimatsi*	*CI*	*p*
(Intersep)	-12,95	-37,48 – 11,57	0,233
L(loutput, 1)	0,26	-0,25 – 0,78	0,248
lintm	-0,04	-6,39 – 6,30	0,986
L(lintm, 1)	4,53	1,66 – 7,41	0,01
Observasi	9		
R^2 / R^2 disesuaikan	0,853 / 0,765		

Tabel 6.9
Log Ketenagakerjaan, Usaha Mikro

Prediktor	*Estimatsi*	*CI*	*p*
(Intersep)	2,97	-2,04 – 7,99	0,188
L(lnaker, 1)	0,90	0,43 – 1,37	0,004
lintm	-0,90	-2,39 – 0,58	0,178
L(lintm, 1)	0,36	-0,29 – 1,00	0,215
Observasi	9		
R^2 / R^2 disesuaikan	0,911 / 0,857		

Tabel 6.10
Log Jumlah Perusahaan, Usaha Mikro

Prediktor	*Estimasi*	*CI*	*p*
(Intersep)	2,25	-4,31 – 8,80	0,418
L(lvana, 1)	0,89	0,38 – 1,39	0,006
lintm	-0,69	-2,54 – 1,16	0,382
L(lintm, 1)	0,33	-0,49 – 1,15	0,351
Observasi	9		
R^2 / R^2 disesuaikan	0.894 / 0.831		

Tabel 6.11
Log Nilai Tambah, Usaha Mikro

Prediktor	*Estimasi*	*CI*	*p*
(Intersep)	-14,52	-40,17 – 11,14	0,205
L(lva, 1)	0,26	-0,28 – 0,79	0,271
lintm	-0,12	-7,04 – 6,79	0,965
L(lintm, 1)	4,92	1,92 – 7,91	0,008
Observasi	9		
R^2 / R^2 disesuaikan	0,836 / 0,738		

Tabel 6.12
Log Nilai Tambah Per Perusahaan, Usaha Mikro

Prediktor	*Estimasi*	*CI*	*p*
(Intersep)	-16,07	-35,84 – 3,69	0,091
L(lvan, 1)	0,02	-0,49 – 0,54	0,914
lintm	0,14	-5,08 – 5,36	0,947
L(lintm, 1)	4,01	1,64 – 6,38	0,007
Observasi	9		
R^2 / R^2 disesuaikan	0,824 / 0,718		

Tabel 6.13
Log Nilai Tambah Per Pekerja, Usaha Mikro

Prediktor	*Estimasi*	*CI*	*p*
(Intersep)	-17,39	-37,76 – 2,98	0,08
L(lvana, 1)	0,08	-0,44 – 0,59	0,722
lintm	0,29	-5,06 – 5,65	0,893
L(lintm, 1)	4,09	1,68 – 6,50	0,007
Observasi	9		
R^2 / R^2 disesuaikan	0,828 / 0,724		

Tabel 6.14
Log Upah, Usaha Mikro

Prediktor	*Estimasi*	*CI*	*p*
(Intersep)	-23,22	-55,52 – 9,07	0,124
L(lw, 1)	-0,22	-0,86 – 0,42	0,418
lintm	0,53	-7,46 – 8,52	0,871
L(lintm, 1)	5,07	1,55 – 8,59	0,014
Observasi	9		
R^2 / R^2 disesuaikan	0,758 / 0,613		

Tabel 6.15
Hasil Uji Bound F

Variabel	Usaha Kecil		Usaha Mikro	
	stat	*pval*	*stat*	*pval*
log output	3,51	0,1	5,71	0,01
log ketenagakerjaan	3,70	0,08	2,92	0,18
log jumlah perusahaan	3,49	0,10	1,77	0,51
log nilai tambah	2,95	0,18	5,42	0,01
log nilai tambah per perusahaan	16,14	0	9,23	0
log nilai tambah per pekerja	17,51	0	8,44	0
log rerata upah	10,72	0	8,92	0

Uji *bound* F (F-*bound test*) (Pesaran, Shin, & Smith, 2001) digunakan untuk menguji korelasi jangka panjang antar variabel yang digunakan dalam ARDL. Hipotesis nol untuk uji ini adalah tidak ada korelasi, sedangkan hipotesis alternatifnya adalah terdapat korelasi. Semua variabel diuji antara variabel-variabel dalam Tabel 6.15 dan *intm*. Hanya log nilai tambah untuk usaha kecil yang tidak menunjukkan korelasi dengan impor input antara. Akan tetapi, nilai tambah per perusahaan dan nilai tambah per pekerjanya berkorelasi dengan intm secara jangka panjang. Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan *intm* tidak palsu.

Kode R untuk pengecekan dan replikasi dapat ditemukan di sini
https://github.com/imedkrisna/food.

Limitasi

Studi ini memiliki limitasi terkait data yang tersedia untuk diolah. Seperti yang telah dijelaskan di atas, BPS tidak menyediakan agregasi yang memungkinkan pemisahan industri minyak kelapa sawit. Selain itu, kami tidak tahu apakah set data perusahaan mikro dan kecil mereka tersedia untuk dibeli. Tanpa adanya informasi yang terperinci ini, kami mengandalkan data yang tersedia yang diagregasi pada tingkat sektoral (yakni, agregasi ISIC 2 digit).

Jumlah observasi juga menjadi limitasi dalam makalah ini. Data yang tersedia secara publik dalam situs web BPS hanya ada untuk kurun waktu 2010–2020. Karena data ini bersifat tahunan, kami hanya dapat melakukan 10 observasi. Meski dalam kasus ini lag pertama sudah cukup, metode-metode berbasis AR, termasuk ARDL, umumnya membutuhkan set data dengan kurun waktu yang lebih panjang. Pendeknya kurun waktu ini membatasi kami untuk menelaah lag di tingkat yang lebih tinggi. Inilah alasan utama mengapa spesifikasi yang kami gunakan bertumpu pada lag pertama dan dibatasi oleh jumlah perancu (*confounders*) yang dapat kami gunakan.

Berbagai studi telah menunjukkan pentingnya impor input antara dan partisipasi ke belakang dalam rantai nilai global secara umum. Makalah ini mendukung temuan-temuan tersebut. Kendati demikian, penelitian lebih lanjut di industri F&B, baik secara umum maupun spesifik untuk perusahaan mikro dan kecil, penggunaan set data yang lebih terperinci dibutuhkan untuk mendapatkan kesimpulan serta saran dan evaluasi kebijakan yang lebih tepat.

TENTANG PENULIS

Hasran adalah seorang Peneliti di Center for Indonesian Policy Studies. Sebelum bergabung dengan CIPS. Ia pernah bekerja sebagai Asisten Peneliti Integrasi Ekonomi Domestik di Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) dan Konsultan Riset untuk Atase Perdagangan KBRI Canberra/Australia. Ia lulus dari Australian National University (ANU) dengan gelar Master di bidang Internasional dan Ekonomi Pembangunan setelah menerima gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Sultan Agung di Semarang.

Dr. Krisna Gupta adalah Peneliti Mitra di Center for Indonesian Policy Studies. Ia merupakan ekonom yang menggunakan berbagai jenis regresi data panel dan alat kuantitatif lainnya untuk mengevaluasi kebijakan perdagangan dan investasi internasional serta pertumbuhan manufaktur Indonesia. Beliau meraih dua gelar PhD dari Crawford School of Public Policy, Australian National University dan dua Master di bidang ekonomi dari Universitas Indonesia dan VU University Amsterdam.

Pada tahun 2019, ia dianugerahi Hadi Soesastro Prize oleh pemerintah Australia untuk keunggulan akademiknya yang luar biasa dalam penelitian pembangunan Indonesia.

Unduh publikasi lainnya yang diterbitkan Center for Indonesian Policy Studies

Perdagangan untuk Pemulihan Ekonomi: Kebijakan Impor untuk Mendukung Sektor Makanan dan Minuman Indonesia

Lahirnya Tata Kelola Perdagangan Baru setelah Omnibus Law

Mendorong Investasi Konstruktif di Sektor Pertanian dan Pangan di ASEAN

Silahkan kunjungi situs kami untuk melihat koleksi lengkapnya:

id.cips-indonesia.org/publication

Center for Indonesian Policy Studies mengajak para pihak yang tertarik untuk mendukung kami dengan bergabung dalam Donor Circles

Jika Anda atau organisasi Anda tertarik untuk bekerja sama dan terlibat lebih dekat dengan CIPS, silakan hubungi:

Anthea Haryoko
Kepala Inovasi dan Pengembangan
Anthea.haryoko@cips-indonesia.org

TENTANG CENTER FOR INDONESIAN POLICY STUDIES

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) merupakan lembaga pemikir non-partisan dan non profit yang bertujuan untuk menyediakan analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan praktis bagi pembuat kebijakan yang ada di dalam lembaga pemerintah eksekutif dan legislatif.

CIPS mendorong reformasi sosial ekonomi berdasarkan kepercayaan bahwa hanya keterbukaan sipil, politik, dan ekonomi yang bisa membuat Indonesia menjadi sejahtera. Kami didukung secara finansial oleh para donatur dan filantropis yang menghargai independensi analisi kami.

FOKUS AREA CIPS:

Ketahanan Pangan dan Agrikultur: Memberikan akses terhadap konsumen di Indonesia yang berpenghasilan rendah terhadap bahan makanan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan berkualitas. CIPS mengadvokasi kebijakan yang menghapuskan hambatan bagi sektor swasta untuk beroperasi secara terbuka di sektor pangan dan pertanian.

Kebijakan Pendidikan: Masa depan SDM Indonesia perlu dipersiapkan dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan terhadap perkembangan abad ke-21. CIPS mengadvokasi kebijakan yang mendorong sifat kompetitif yang sehat di antara penyedia sarana pendidikan. Kompetisi akan mendorong penyedia sarana untuk terus berupaya berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan terhadap anak-anak dan orang tua yang mereka layani. Secara khusus, CIPS berfokus pada peningkatan keberlanjutan operasional dan keuangan sekolah swasta berbiaya rendah yang secara langsung melayani kalangan berpenghasilan rendah.

Peluang Ekonomi: CIPS mengadvokasi kebijakan yang bertujuan untuk memperluas kesempatan ekonomi dan peluang bagi pengusaha dan sektor bisnis di Indonesia, serta kebijakan yang membuka peluang lebih luas bagi masyarakat Indonesia berpenghasilan rendah untuk mendapatkan pendapatan yang lebih layak dan menciptakan kesejahteraan ekonomi

www.cips-indonesia.org

facebook.com/cips.indonesia

@cips_id

@cips_id

Center for Indonesian Policy Studies

Center for Indonesian Policy Studies

Jalan Terogong Raya No. 6B
Cilandak, Jakarta Selatan 12430
Indonesia

Hak Cipta © 2023 oleh Center for Indonesian Policy Studies